

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
DANA PNBP FAKULTAS TAHUN ANGGARAN 2014**



**STUDI *ETHNOSCIENCE*: DILEMA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PELAPORAN SUMBANGAN DONATUR
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID
(Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo)**

Ronald S. Badu, SE., M.Si (Ketua)

Imran Rosman Hambali, S.Pd., SE., MSA (Anggota)

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN DANA PNBP FEB**

Judul Kegiatan : Studi Ethnosains: Dilema Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo)

KETUA PENELITIAN

A. Nama Lengkap : Ronald S. Badu, SE, M.Si
B. NIDN : 0023108301
C. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
D. Program Studi : D3 Akuntansi
E. Nomor HP : 08239393823
F. Email : ronaldsoemitro@gmail.com

ANGGOTA PENELITIAN

(1)

A. Nama Lengkap : Imran Rosman Hambali, S.Pd, SE, MSA
B. NIDN : 0023087004
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Lama Penelitian Keseluruhan : 3 bulan

Penelitian Tahun Ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 5.000.000,-

Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 5.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

(Imran Rosman Hambali, S.Pd, SE, MSA)
NIP/NIK. 197008231999031005

Gorontalo, 20 November 2014
Ketua Penelitian,

(Ronald S. Badu, SE, M.Si)
NIP/NIK. 198310232008121002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Dr. Fitriyane Lihawa, M.Si)
NIP/NIK. 196912091993032001

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Studi *Ethnosains*: Dilema Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo)

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Ronald S. Badu, SE., M.Si
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 198310232008121002
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- f. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG
- g. Pusat Penelitian : Kabupaten Gorontalo
- h. Alamat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- i. Telepon/Faks : 0435-829713
- j. Alamat Rumah : Jl. Nani Wartabone Kel. Tumbihe, Kec. Kabila. Kab. Bone Bolango
- k. Telepon/Faks : 082393938230

3. Tim Peneliti

No	Nama dan gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Wktu(Jam /Minggu
1	Imran Rosman Hambali, S.Pd., SE., MSA	Sektor Publik	FEB UNG	3

- 4. Objek Penelitian : Akuntansi Sektor Publik
- 5. Masa Pelaksanaan Penelitian : Mulai : Oktober 2014
Berakhir : Desember 2014
- 6. Anggaran yang Disiapkan : Rp 5.000.000,-
- 7. Lokasi Penelitian : Kabupaten Gorontalo
- 8. Hasil yang Ditargetkan : Pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Masjid bagi pengelolaan entitas peribadatan.

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian awal yang bertujuan menemukan pemahaman simbol akuntansi masjid yang ideal dari masyarakat Gorontalo khususnya *stakeholder* yang secara langsung merasakan permasalahan yang berhubungan dengan tata kelola keuangan entitas peribadatan. Melalui penelusuran budaya yang lahir dari pengetahuan dan interaksi sosial di tengah-tengah kompleksitas pengelolaan entitas peribadatan, diharapkan penelitian ini dapat mengangkat kearifan lokal (*local wisdom*) yang disinergikan dengan keberadaan organisasi masjid dalam berfikir dan bertindak. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo sebagai objek penelitian. Alasan konkritnya, penelitian ini ingin mengangkat nilai-nilai budaya sebagai warisan pengetahuan kedalam sisi maskulin akuntansi yang selama ini masih direduksi kedalam bentuk materialis. Penelitian ini menggunakan metode analisis etnosains sebagai bagian dari metode etnografer dalam bidang ilmu antropologi. Etnosains lebih menggali pengetahuan dari penduduk asli secara *setting* alamiah dan bukan pengetahuan dari peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas sebahagian masyarakat masih menganggap bahwa pelaporan keuangan tidak perlu di laporkan. Penelitian ini kemudian menemukan bahwasanya 1. Minimnya pemahaman masyarakat pentingnya pelaporan keuangan, 2. Masih terbatasnya perhatian pemerintah terhadap organisasi masjid, 3. Sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam mengelola keuangan, dan 4. Perlunya kajian-kajian islami secara menyeluruh adalah 4 hal yang peneliti tawarkan sebagai solusi pemecahannya.

Kata Kunci: Akuntansi Masjid, Entitas Peribadatan, Budaya

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang Studi.....	1
1.2.	Fokus Masalah Penelitian.....	4
1.3.	Tujuan Penelitian.....	4
1.4.	Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II	AKUNTANSI MASJID KAJIAN ANTROPOLOGI: PENDEKATAN ETNOSAINS.....	6
2.1.	Antropologi Sosial – Budaya: Etnosains Merupakan Pengetahuan Masyarakat Bukan Pengetahuan Peneliti	6
A.	Konsep kebudayaan: <i>Adati Hulohulo’o Sara’a Hulohulo’o Kuru’ani Kitabullah</i>	7
B.	Kebudayaan Diperoleh dari Belajar.....	9
C.	Kebudayaan Milik Bersama.....	10
D.	Kebudayaan Sebagai Pola.....	11
E.	Kebudayaan Bersifat Dinamis dan Adaptif.....	13
2.2.	Tempat Ibadah Sebagai Entitas: Dari Umat Untuk Masyarakat.....	17
A.	Tujuan Organisasi Peribadatan.....	20
B.	Fungsi dan Peran Organisasi Peribadatan.....	22
C.	Manajemen Organisasi Peribadatan.....	24
D.	Manajemen Keuangan Organisasi Peribadatan.....	25
BAB III	ETNOSAINS SEBAGAI METODE ANALISIS DAN <i>CONTEXTUAL UNDERSTANDING</i>	29
3.1.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
3.2.	Pengelolaan Peran Peneliti	32
3.3.	Lokasi Penelitian.....	33
3.4.	Sumber Data.....	34
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	34
3.6.	Teknik Analisis Data	37
3.7.	Pengecekan Validitas Temuan	38
BAB IV	TEMUAN SIMBOL-SIMBOL: SETTING SOSIAL PANDANGAN MASYARAKAT PERLU TIDAKNYA LAPORAN SUMBANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID.....	39
4.1.	Akuntansi Masjid Sebagai Pola Akuntabilitas yang Bersifat Vertikal dan Horizontal.....	41
4.2.	Realitas Destruktif, Dilema si “Dia”: Antara sifat Ria, Takabbur dan Ikhlas.....	44
4.3.	Realitas Konstruktif: Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Aksentuasi Budaya.....	47

BAB V KILAS BALIK: MASALAH DAN SOLUSI PEMECAHANNYA.....	53
5.1. Minimnya Pemahaman Masyarakat Pentingnya Pelaporan Keuangan.....	53
5.2. Masih Terbatasnya Perhatian Pemerintah terhadap Organisasi Masjid.....	54
5.3. Sumber Daya Manusia yang belum Mumpuni dalam Mengelola Keuangan.....	55
5.4. Perlunya Kajian-kajian Islami Secara Menyeluruh.....	55
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
6.1. Kesimpulan.....	57
6.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR GAMBAR

1. Keuangan Akuntansi Dalam Manajemen Keuangan Organisasi Masjid..... 26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Studi

Beberapa dekade terakhir ini, akuntansi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kalau dalam perkembangannya akuntansi yang kita kenal lebih banyak berorientasi di sektor swasta, kini akuntansi masjid hadir sebagai bagian budaya yang lahir di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam prakteknya, akuntansi yang beroperasi di lingkup sektor publik semacam ini sering dipandang sebelah mata oleh para pelaku keputusan sehingga sering termarginalkan atau ter-subordinalkan. Peran akuntansi sebagai *tools* dalam lingkup keagamaan untuk entitas-entitas peribadatan sebenarnya hadir dengan bentuk kombinasi antara akuntansi dan agama (spiritual) atau sistim nilai dan transenden.

Sebagai entitas, masjid menggunakan pelaporan akuntansi yang dananya berasal dari sumbangan masyarakat sebagai sumber keuangannya, seperti; sumbangan donatur, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mempertanggungjawabkan ke publik semua laporan keuangan tersebut. Perlunya penyajian yang akuntabel dan transparan dalam pelaporannya, agar menjadi kunci sukses bagi entitas untuk tetap eksis dan bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Masjid adalah simbol ibadah dan jika dimaknai sebagai akuntansi masjid maka masjid berdampingan dengan sisi maskulin akuntansi yang selalu diartikan materialis. Dalam bentuk pelaporan mereka hadir untuk saling melengkapi. Ada anggapan yang berkembang khususnya untuk entitas yang berorientasi laba (Privat), bahwa akuntansi selama ini tidak bisa berdampingan dengan spiritual, dikarenakan spiritual dapat mempersempit ruang gerak para pemilik perusahaan untuk mendapatkan keuntungan

sebanyak-banyaknya. Sebagai sebuah simbol para pelaku keputusan lebih menghidupkan sisi egoistik dibanding altruistik. Berbeda halnya dengan simbol dibalik akuntansi masjid yang mungkin hadir sebagai bentuk pelaporan keuangan yang lebih emansipatoris dan humanis, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana, tetapi sarat ajaran Tauhid. Islam menjadi bagian dari budaya, oleh karena itu, perubahan radikal dalam pemikiran akuntansi itu menjadi penting ketika nilai historis budaya hadir sebagai penyeimbang. Dalam budaya yang kita anut tentu memiliki ciri khas dan pola tersendiri bertujuan untuk mengatur bagaimana cara kita dalam hidup bermasyarakat. Bagaimana manusia berfikir dan bertindak, sebuah simbol yang patut dijadikan perangkat untuk mengaplikasikan bentuk yang utuh dari akuntansi masjid.

Propinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo memiliki budaya sangat kental dengan semboyan “Adat Bersendi Syara’ Syara Bersendi Kitabullah” hal ini nampak dari kegiatan-kegiatan kerohanian. Misalnya; Isra’ Mi’raj (pembacaan Mi’raji), Maulid Nabi Muhammad (pembacaan barjanji dengan bahasa daerah), Puasa Ramadhan (Tumbila Tohe) dan lain sebagainya hadir sebagai simbol bentuk rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang dibangkitkan melalui kebiasaan adat-istiadat Gorontalo. Oleh karena itu, akuntansi perlu hadir dengan wajah baru menjadi bagian dari cerminan budaya yang dianut dimana akuntansi itu bersinggungan. Dengan demikian, Ini mengisyaratkan bahwa akuntansi tidak hanya sebatas angka-angka keuangan semata tapi akuntansi juga dapat dimaknai beerbeda oleh lingkungan dan makhluk sosialnya, termasuk budaya dan spritual dimana akuntansi itu praktekkan.

Bagi seorang pemikir seperti Booth (1993) berpendapat bahwa, pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti Gereja sebagai objek penelitian Booth, hanya mentolerir akuntansi pada batas mendukung kegiatan spiritual,

tidak terintegrasi mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan Akuntansi pada dasarnya adalah *tools* atau instrument yang dapat memberikan informasi keuangan dan mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan.

Namun, berbeda dengan penemuan kami dilapangan, menurut pandangan sebahagian pengurus masjid bahwa ada keraguan untuk menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan laporan penyumbang (jumlah disumbangkan) kepada publik (jamaah). Anggapan sementara menurut pendapat mereka bahwa laporan sumbangan yang disampaikan dapat menimbulkan sifat “ria, ujub, takabbur dan sombong”, misalnya penyampaian berapa jumlah sumbangan dari jamaah setempat. Situasi dilematis yang dipertontonkan seperti ini, menyebabkan para pengurus pada akhirnya merasa tidak perlu menyampaikan laporan penyumbang (siapa dan berapa jumlah sumbangnya). Berbeda dengan jamaah lainnya, yang memandang perlunya laporan siapa dan jumlah sumbangan yang masuk dari donator, agar informasi mengenai posisi keuangan secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran akuntansi sebagai informasi, sebenarnya diharapkan dapat mendorong perubahan sosial, merubah paradigm dan pola pikir masyarakat. Dengan kata lain, laporan keuangan atau bentuk laporan lainnya yang berhubungan dengan posisi keuangan perlu menjadi perhatian serius dan perlu dilaporkan ke publik agar tidak meresahkan dan menimbulkan kecurigaan antara pengurus dan jamaah.

Penelitian ini sebagai langkah awal untuk memahami budaya yang berkembang ditengah masyarakat yang berhubungan dengan masalah dilematis perlu atau tidaknya melaporkan kepada publik laporan donator tersebut. Penelitian ini kemudian bertujuan memahami makna akuntansi masjid menurut pemahaman penduduk asli, dengan menggunakan pendekatan *ethnoscience* sehingga dapat ditemukan solusi pemecahannya

dimana akuntansi dapat diterima dan dipandang sebagai instrument penting bagi pengelolaan masjid sebagai perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban.

B. Fokus Masalah Penelitian

Mengingat akuntansi seperti pedang bermata dua, dia mampu mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungannya dimana akuntansi itu dipraktekkan. Maka perlunya mengetahui awal kebijakan dari mana akuntansi dikonstruksi, dengan kata lain penggalian informasi dari penduduk asli menjadi penting untuk mengetahui simbol dibalik permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga diharapkan dapat dirumuskan bagaimana pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, sejalan dengan pemahaman latar belakang studi maka pertanyaan studi ini adalah “Bagaimana penduduk asli memahami dilematis transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masjid”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali pemahaman bagaimana makna simbol-simbol budaya atas keputusan menyampaikan atau tidaknya laporan donatur.
2. Penelitian ini bertujuan menggali simbol-simbol yang digunakan penduduk asli, cara mereka berfikir, dan bertindak, penggunaan bahasa dalam berinteraksi. Berdasarkan data-data kualitatif yang diperoleh, maka studi ini akan diharapkan akan mampu menginterpretasikan simbol budaya, adat istiadat kedalam pemikiran akuntansi dimana akuntansi dipraktekkan .
3. Untuk itu, dari kedua tujuan tersebut maka pada masa yang akan datang akan menuntun peneliti untuk merumuskan bagaimana sebaiknya konstruk laporan keuangan untuk masjid.

D. Kegunaan Penelitian

Kontribusi yang diharapkan adalah:

1. Formulasi akuntansi masjid selama ini masih mencari bentuk idealnya, oleh karena itu melalui nilai-nilai lokal spiritual dan simbol yang terkandung dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif kajian ilmiah dalam pembenahannya.
2. Diharapkan dapat memberikan pedoman yang baik bagi para pengguna informasi dalam mengembangkan nilai-nilai spritual yang tertuang dalam Akuntansi Masjid, sehingga diharapkan dapat mendorong pembenahan bentuk ideal dari Akuntansi Masjid itu sendiri.

BAB II
AKUNTANSI MASJID KAJIAN ANTROPOLOGI:
PENDEKATAN ETNOSAINS

Prolog

Dalam Akuntansi Masjid, pengetahuan dibangun melalui pemikiran “self” dalam bentuk yang lebih utuh dari bentuk sosial dan budaya. Ini lebih memperkuat eksistensi akuntansi sebagai ilmu sosial (*Social Science*) karena deskripsi pemahaman yang lahir dari pemahaman inderawi secara alamiah dari interaksi masyarakat. Jika dalam etnografi modern, bentuk dan sosial budaya masyarakat dibangun dan dideskripsikan melalui analisis dan nalar sang peneliti, maka dalam etnografi baru (etnosains) bentuk tersebut dianggap sebagai susunan yang terdapat dalam pikiran (*mind*) anggota masyarakat tersebut. Tugas dan cara peneliti mengorekannya keluar lalu mendeskripsikannya adalah khas metode dari etnosains (Spradley 2006:xii).

2.1 Antropologi Sosial-Budaya: Etnosains Merupakan Pengetahuan masyarakat bukan Pengetahuan Peneliti

Antropologi Sosial-Budaya atau lebih sering disebut Antropologi Budaya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan Etnologi. Ilmu ini mempelajari tingkah-laku manusia, baik itu tingkah-laku individu atau tingkah laku kelompok. Tingkah-laku yang dipelajari disini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati dengan mata saja, tetapi juga apa yang ada dalam pikiran mereka. Pada manusia, tingkah-laku ini tergantung pada proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya disadari atau tidak. Mereka mempelajari bagaimana bertingkah-laku ini dengan cara mencontoh atau belajar dari generasi di atasnya dan juga dari lingkungan alam dan sosial yang ada

disekelilingnya. Inilah yang oleh para ahli Antropologi disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia, baik itu kelompok kecil maupun kelompok yang sangat besar inilah yang menjadi objek spesial dari penelitian-penelitian Antropologi Sosial Budaya. Metode etnosains adalah menyibak pengetahuan langsung dari masyarakat, berbeda dengan pandangan etnometodologi yang merupakan kajian sosiologi yang mengungkap pengetahuan secara reflektif dari peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memahami sudut pandang studi melalui penduduk asli yaitu suku Gorontalo.

Dalam perkembangannya Antropologi Sosial-Budaya ini memecah lagi kedalam bentuk-bentuk spesialisasi atau pengkhususan disesuaikan dengan bidang kajian yang dipelajari atau diteliti. Antropologi Hukum yang mempelajari bentuk-bentuk hukum pada kelompok-kelompok masyarakat atau Antropologi Ekonomi yang mempelajari gejala-gejala serta bentuk-bentuk perekonomian pada kelompok-kelompok masyarakat adalah dua contoh dari sekian banyak bentuk spesialisasi dalam Antropologi Sosial-Budaya.

A. Konsep kebudayaan: *Adati Hulohulo'o Sara'a Hulohulo'o Kuru'ani Kitabullah*

Kata Kebudayaan atau budaya adalah kata yang sering dikaitkan dengan Antropologi. Secara pasti, Antropologi tidak mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan istilah ini. Seniman seperti penari atau pelukis dan lain-lain juga memakai istilah ini atau diasosiasikan dengan istilah ini, bahkan pemerintah juga mempunyai departemen untuk ini. Konsep ini memang sangat sering digunakan oleh Antropologi dan telah tersebar kemasyarakat luas termasuk suku gorontalo yang kental dengan adat istiadat budayanya. Diantara yang menjadi perhatian utama oleh peneliti adalah semboyan yang melekat pada suku Gorontalo yaitu "*Adati Hulohulo'o Sara'a Hulolo'o Kuru'ani Kitabullah*" yang jika dialih bahasakan ke bahasa Indonesia yang benar menjadi "Adat Bersendi Syara', Sara' bersendi

Kitabullah”. Semboyan tersebut memberikan makna bagi setiap langkah dan berperilaku baik di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat Gorontalo harus menjadikan Jaringan Tuhan sebagai tujuan utama dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, gambaran yang dipertontonkan selama ini Gorontalo sangat identik dengan daerah religius yang bernuansa islami dengan “Serambi Medinah” yang menjadi julukannya. Atas dasar itu, budaya yang bergerak seiring perkembangannya tidak pernah luput dari pengetahuan dasar masyarakat Gorontalo yaitu menenmpatkan rasa cinta kepada Allah SWT sebagai pemilik tunggal kerajaan langit dan bumi. Memahami budaya yang lahir dari pemahaman masyarakat suku maka peneliti memahami bahwa antropologi sebagai ilmu yang mempelajari budaya harus bersama-sama dengan disiplin ilmu lainnya seperti akuntansi dalam mencari bentuk asli peradaban yang sarat dengan makna. Antropologi bekerja atau meneliti apa yang sering disebut dengan kebudayaan. Seringnya istilah ini digunakan oleh Antropologi dalam pekerjaan-pekerjaannya bukan berarti para ahli Antropolgi mempunyai pengertian yang sama tentang istilah tersebut. Seorang Ahli Antropologi yang mencoba mengumpulkan definisi yang pernah dibuat mengatakan ada sekitar 160 defenisi kebudayaan yang dibuat oleh para ahli Antropologi. Tetapi dari sekian banyak definisi tersebut ada suatu persetujuan bersama diantara para ahli Antropologi tentang arti dari istilah tersebut. Salah satu definisi kebudayaan dalam Antropologi dibuat seorang ahli bernama Ralph Linton yang memberikan defenisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari:

“Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan”.

Jadi, kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

Seperti semua konsep-konsep ilmiah, konsep kebudayaan berhubungan dengan beberapa aspek “di luar sana” yang hendak diteliti oleh seorang ilmuwan. Konsep-konsep kebudayaan yang dibuat membantu peneliti dalam melakukan pekerjaannya sehingga ia tahu apa yang harus dipelajari. Salah satu hal yang diperhatikan dalam penelitian Antropologi adalah perbedaan dan persamaan mahluk manusia dengan mahluk bukan manusia seperti simpanse atau orang-utan yang secara fisik banyak mempunyai kesamaan-kesamaan. Bagaimana konsep kebudayaan membantu dalam membandingkan mahluk-mahluk ini? Isu yang sangat penting disini adalah kemampuan belajar dari berbagai mahluk hidup. Lebah melakukan aktifitasnya hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun dalam bentuk yang sama. Setiap jenis lebah mempunyai pekerjaan yang khusus dan melakukan kegiatannya secara kontinyu tanpa memperdulikan perubahan lingkungan disekitarnya.

Lebah pekerja terus sibuk mengumpulkan madu untuk koloninya. Tingkah laku ini sudah terprogram dalam gen mereka yang berubah secara sangat lambat dalam mengikuti perubahan lingkungan di sekitarnya. Perubahan tingkah laku lebah akhirnya harus menunggu perubahan dalam gen nya. Hasilnya adalah tingkah-laku lebah menjadi tidak fleksibel. Berbeda dengan manusia, tingkah laku manusia sangat fleksibel. Hal ini terjadi karena kemampuan yang luar biasa dari manusia untuk belajar dari pengalamannya. Benar bahwa manusia tidak terlalu istimewa dalam belajar karena mahluk lainnya pun ada yang mampu belajar, tetapi kemampuan

belajar dari manusia sangat luar-biasa dan hal lain yang juga sangat penting adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan apa yang telah dipelajari itu.

B. Kebudayaan Diperoleh dari Belajar

Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki dengan cara belajar. Dia tidak diturunkan secara biologis atau pewarisan melalui unsur genetis. Hal ini perlu ditegaskan untuk membedakan perilaku manusia yang digerakan oleh kebudayaan dengan perilaku mahluk lain yang tingkah-lakunya digerakan oleh insting.

Ketika baru dilahirkan, semua tingkah laku manusia yang baru lahir tersebut digerakkan oleh insting dan naluri. Insting atau naluri ini tidak termasuk dalam kebudayaan, tetapi mempengaruhi kebudayaan. Contohnya adalah kebutuhan akan makan. Makan adalah kebutuhan dasar yang tidak termasuk dalam kebudayaan. Tetapi bagaimana kebutuhan itu dipenuhi; apa yang dimakan, bagaimana cara memakan adalah bagian dari kebudayaan. Semua manusia perlu makan, tetapi kebudayaan yang berbeda dari kelompok-kelompoknya menyebabkan manusia melakukan kegiatan dasar itu dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah cara makan yang berlaku sekarang. Pada masa dulu orang makan hanya dengan menggunakan tangannya saja, langsung menyuapkan makanan kedalam mulutnya, tetapi cara tersebut perlahan lahan berubah, manusia mulai menggunakan alat yang sederhana dari kayu untuk menyendok dan menyuapkan makanannya dan sekarang alat tersebut dibuat dari banyak bahan. Begitu juga tempat dimana manusia itu makan. Dulu manusia makan disembarang tempat, tetapi sekarang ada tempat-tempat khusus dimana makanan itu dimakan. Hal ini semua terjadi karena manusia mempelajari atau mencontoh sesuatu yang dilakukan oleh generasi sebelumnya atau lingkungan disekitarnya yang dianggap baik dan berguna dalam hidupnya.

Sebaliknya kelakuan yang didorong oleh insting tidak dipelajari. Semut semut yang dikatakan bersifat sosial tidak dikatakan memiliki kebudayaan, walaupun mereka mempunyai tingkah-laku yang teratur. Mereka membagi pekerjaannya, membuat sarang dan mempunyai pasukan penyerbu yang semuanya dilakukan tanpa pernah diajari atau tanpa pernah meniru dari semut yang lain. Pola kelakuan seperti ini diwarisi secara genetis.

C. Kebudayaan Milik Bersama

Agar dapat dikatakan sebagai suatu kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan seorang individu harus dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia. Para ahli Antropologi membatasi diri untuk berpendapat suatu kelompok mempunyai kebudayaan jika para warganya memiliki secara bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang sama yang didapat melalui proses belajar.

Suatu kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai dan cara berlaku atau kebiasaan yang dipelajari dan yang dimiliki bersama oleh para warga dari suatu kelompok masyarakat. Pengertian masyarakat sendiri dalam Antropologi adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah dan yang memakai suatu bahasa yang biasanya tidak dimengerti oleh penduduk tetangganya.

D. Kebudayaan sebagai Pola

Dalam setiap masyarakat, oleh para anggotanya dikembangkan sejumlah pola-pola budaya yang ideal dan pola-pola ini cenderung diperkuat dengan adanya pembatasan-pembatasan kebudayaan. Pola-pola kebudayaan yang ideal itu memuat hal-hal yang oleh sebagian besar dari masyarakat tersebut diakui sebagai kewajiban yang harus dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Pola-pola inilah yang sering disebut dengan norma-norma, Walaupun kita semua tahu bahwa tidak semua orang

dalam kebudayaannya selalu berbuat seperti apa yang telah mereka patokkan bersama sebagai hal yang ideal tersebut. Sebab bila para warga masyarakat selalu mematuhi dan mengikuti norma-norma yang ada pada masyarakatnya maka tidak akan ada apa yang disebut dengan pembatasan-pembatasan kebudayaan. Sebagian dari pola-pola yang ideal tersebut dalam kenyataannya berbeda dengan perilaku sebenarnya karena pola-pola tersebut telah dikesampingkan oleh cara-cara yang dibiasakan oleh masyarakat.

Pembatasan kebudayaan itu sendiri biasanya tidak selalu dirasakan oleh para pendukung suatu kebudayaan. Hal ini terjadi karena individu-individu pendukungnya selalu mengikuti cara-cara berlaku dan cara berpikir yang telah dituntut oleh kebudayaan itu. Pembatasan-pembatasan kebudayaan baru terasa kekuatannya ketika dia ditentang atau dilawan. Pembatasan kebudayaan terbagi kedalam 2 jenis yaitu pembatasan kebudayaan yang langsung dan pembatasan kebudayaan yang tidak langsung.

Pembatasan langsung terjadi ketika kita mencoba melakukan suatu hal yang menurut kebiasaan dalam kebudayaan kita merupakan hal yang tidak lazim atau bahkan hal yang dianggap melanggar tata kesopanan atau yang ada. Akan ada sindiran atau ejekan yang dialamatkan kepada sipelanggar kalau hal yang dilakukannya masih dianggap tidak terlalu berlawanan dengan kebiasaan yang ada, akan tetapi apabila hal yang dilakukannya tersebut sudah dianggap melanggar tata-tertib yang berlaku dimasyarakatnya, maka dia mungkin akan dihukum dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Contoh dari pembatasan langsung misalnya ketika seseorang melakukan kegiatan seperti berpakaian yang tidak pantas kedalam gereja. Ada sejumlah aturan dalam setiap kebudayaan yang mengatur tentang hal ini. Kalau si individu tersebut hanya tidak mengenakan baju saja ketika

ke gereja, mungkin dia hanya akan disindir atau ditegur dengan pelan. Akan tetapi bila si individu tadi adalah seorang wanita dan dia hanya mengenakan pakaian dalam untuk ke gereja, dia mungkin akan di tangkap oleh pihak-pihak tertentu karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Dalam pembatasan-pembatasan tidak langsung, aktifitas yang dilakukan oleh orang yang melanggar tidak dihalangi atau dibatasi secara langsung akan tetapi kegiatan tersebut tidak akan mendapat respons atau tanggapan dari anggota kebudayaan yang lain karena tindakan tersebut tidak dipahami atau dimengerti oleh mereka. Contohnya: tidak akan ada orang yang melarang seseorang di pasar Hamadi, Jayapura untuk berbelanja dengan menggunakan bahasa Polandia, akan tetapi dia tidak akan dilayani karena tidak ada yang memahaminya.

Pembatasan-pembatasan kebudayaan ini tidak berarti menghilangkan kepribadian seseorang dalam kebudayaannya. Memang kadang-kadang pembatasan kebudayaan tersebut menjadi tekanan-tekanan sosial yang mengatur tata-kehidupan yang berjalan dalam suatu kebudayaan, tetapi bukan berarti tekanan-tekanan sosial tersebut menghalangi individu-individu yang mempunyai pendirian bebas. Mereka yang mempunyai pendirian seperti ini akan tetap mempertahankan pendapat-pendapat mereka, sekalipun mereka mendapat tentangan dari pendapat yang mayoritas.

Kenyataan bahwa banyak kebudayaan dapat bertahan dan berkembang menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan oleh masyarakat pendukungnya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari lingkungannya. Ini terjadi sebagai suatu strategi dari kebudayaan untuk dapat terus bertahan, karena kalau sifat-sifat budaya tidak disesuaikan kepada beberapa keadaan tertentu, kemungkinan masyarakat untuk bertahan akan berkurang. Setiap adat yang

meningkatkan ketahanan suatu masyarakat dalam lingkungan tertentu biasanya merupakan adat yang dapat disesuaikan, tetapi ini bukan berarti setiap ada mode yang baru atau sistem yang baru langsung diadopsi dan adat menyesuaikan diri dengan pembaruan itu. Karena dalam adat-istiadat itu ada konsep yang dikenal dengan sistem nilai budaya yang merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu kebudayaan tentang apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga ia memberi pedoman, arah serta orientasi kepada kehidupan warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

E. Kebudayaan Bersifat Dinamis dan Adaptif

Pada umumnya kebudayaan itu dikatakan bersifat adaptif, karena kebudayaan melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis dari badan mereka, dan penyesuaian pada lingkungan yang bersifat fisik-geografis maupun pada lingkungan sosialnya. Banyak cara yang wajar dalam hubungan tertentu pada suatu kelompok masyarakat memberi kesan janggal pada kelompok masyarakat yang lain, tetapi jika dipandang dari hubungan masyarakat tersebut dengan lingkungannya, baru hubungan tersebut bisa dipahami. Misalnya, orang akan heran kenapa ada pantangan-pantangan pergaulan seks pada masyarakat tertentu pada kaum ibu sesudah melahirkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia tertentu. Bagi orang di luar kebudayaan tersebut, pantangan tersebut susah dimengerti, tetapi bagi masyarakat pendukung kebudayaan yang melakukan pantangan-pantangan seperti itu, hal tersebut mungkin suatu cara menyesuaikan diri pada lingkungan fisik dimana mereka berada. Mungkin daerah dimana mereka tinggal tidak terlalu mudah memenuhi kebutuhan makan mereka, sehingga sebagai strategi

memberikan gizi yang cukup bagi anak bayi dibuatlah pantangan-pantangan tersebut. Hal ini nampaknya merupakan hal yang sepele tetapi sebenarnya merupakan suatu pencapaian luar biasa dari kelompok masyarakat tersebut untuk memahami lingkungannya dan berinteraksi dengan cara melakukan pantangan-pantangan tersebut. Pemahaman akan lingkungan seperti ini dan penyesuaian yang dilakukan oleh kebudayaan tersebut membutuhkan suatu pengamatan yang seksama dan dilakukan oleh beberapa generasi untuk sampai pada suatu kebijakan yaitu melakukan pantangan tadi. Begitu juga dengan penyesuaian kepada lingkungan sosial suatu masyarakat; bagi orang awam mungkin akan merasa adalah suatu hal yang tidak perlu untuk membangun kampung jauh diatas bukit atau kampung di atas air dan sebagainya, karena akan banyak sekali kesulitan-kesulitan praktis dalam memilih tempat-tempat seperti itu. Tetapi bila kita melihat mungkin pada hubungan-hubungan sosial yang terjadi di daerah itu, akan didapat sejumlah alasan mengapa pilihan tersebut harus dilakukan. Mungkin mereka mendapat tekanan-tekanan sosial dari kelompok-kelompok masyarakat disekitarnya dalam bentuk yang ekstrim sehingga mereka harus mempertahankan diri dan salah satu cara terbaik dalam pilihan mereka adalah membangun kampung di puncak bukit.

Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat tertentu merupakan cara penyesuaian masyarakat itu terhadap lingkungannya, akan tetapi cara penyesuaian tidak akan selalu sama. Kelompok masyarakat yang berlainan mungkin saja akan memilih cara-cara yang berbeda terhadap keadaan yang sama. Alasan mengapa masyarakat tersebut mengembangkan suatu jawaban terhadap suatu masalah dan bukan jawaban yang lain yang dapat dipilih tentu mempunyai sejumlah alasan dan argumen. Alasan-alasan ini sangat banyak dan bervariasi dan ini memerlukan suatu penelitian untuk menjelaskannya.

Tetapi harus diingat juga bahwa masyarakat itu tidak harus selalu menyesuaikan diri pada suatu keadaan yang khusus. Sebab walaupun pada umumnya orang akan mengubah tingkah-laku mereka sebagai jawaban atau penyesuaian atas suatu keadaan yang baru sejalan dengan perkiraan hal itu akan berguna bagi mereka, hal itu tidak selalu terjadi. Malahan ada masyarakat yang dengan mengembangkan nilai budaya tertentu untuk menyesuaikan diri mereka malah mengurangi ketahanan masyarakatnya sendiri. Banyak kebudayaan yang punah karena hal-hal seperti ini. Mereka memakai kebiasaan-kebiasaan baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap keadaan-keadaan baru yang masuk kedalam atau dihadapi kebudayaannya tetapi mereka tidak sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dibuat sebagai penyesuaian terhadap unsur-unsur baru yang masuk dari luar kebudayaannya malah merugikan mereka sendiri. Disinilah pentingnya filter atau penyaring budaya dalam suatu kelompok masyarakat. Karena sekian banyak aturan, norma atau adat istiadat yang ada dan berlaku pada suatu kebudayaan bukanlah suatu hal yang baru saja dibuat atau dibuat dalam satu dua hari saja. Kebudayaan dengan sejumlah normanya itu merupakan suatu akumulasi dari hasil pengamatan, hasil belajar dari pendukung kebudayaan tersebut terhadap lingkungannya selama beratus-ratus tahun dan dijalankan hingga sekarang karena terbukti telah dapat mempertahankan kehidupan masyarakat tersebut.

Siapa saja dalam masyarakat yang melakukan filterasi atau penyaringan ini tergantung dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran akan melakukan penyaringan ini juga tidak selalu sama pada setiap masyarakat dan hasilnya juga berbeda pada setiap masyarakat. Akan terjadi pro-kontra antara berbagai elemen dalam masyarakat, perbedaan persepsi antara generasi tua dan muda, terpelajar dan yang kolot dan banyak lagi lainnya.

2.2 Tempat Ibadah Sebagai Entitas: Dari Umat Untuk Masyarakat

Berdasarkan ukuran kepemilikannya, organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi sektor privat atau swasta dan organisasi sektor publik. Organisasi sektor privat merupakan organisasi yang kepemilikannya lebih didominasi oleh kepemilikan satu atau kelompok investor saja, sedangkan organisasi sektor publik adalah organisasi yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Artinya, organisasi sektor publik memiliki wilayah dan kompleksitas yang lebih besar dibandingkan organisasi sektor privat. Keluasan wilayah organisasi sektor publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga public tersebut (Mardiasmo, 2009). Sering kali, organisasi sektor publik merujuk pada organisasi pemerintah atau Negara (lihat Halim, 2008: 251; dan Mardiasmo, 2009: 16).

Namun, Untoro (2010) menemukan adanya perbedaan antara organisasi sektor privat dengan organisasi sektor publik dengan menggunakan pendekatan kepublikan. Kepublikan suatu organisasi dapat dinilai dari tiga dimensi, yaitu dimensi lingkungan, dimensi transaksional, dan dimensi organisasional. Dimensi lingkungan merupakan faktor-faktor di luar yang mempengaruhi organisasi. Dimensi transaksional merupakan hubungan organisasi pada satuan-satuan dalam lingkungannya. Yaitu, terkait dengan proses organisasional yang terjadi dalam internal organisasi. Dengan pendekatan dimensional inilah, yang menjadikan organisasi sektor public tidak lagi sinonim dengan lembaga pemerintahan saja, melainkan juga dapat meliputi yayasan, organisasi partai politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas, dan organisasi nirlaba lainnya termasuk organisasi tempat ibadah atau organisasi peribadatan atau Bastian (2007) menyebutnya dengan organisasi keagamaan.

Selama ini, tempat ibadah hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, sembahyang, berdoa, menyembah, berdzikir, dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya tempat ibadah apabila disadari sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi public lainnya. Mungkin hal ini sekilas dianggap sebagai sesuatu yang mengada – ada dan terkesan membesar-besarkan (hiperbola). Namun, sebenarnya tempat ibadah dapat dijadikan sebagai pusat aktivitas (*center of activity*) dari masyarakat sesuai dengan agama masing-masing. Pusat aktivitas ini meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Jika hal ini mampu dijalankan oleh tempat ibadah, maka akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh (paripurna) yaitu kesejahteraan lahir (fisik) dan kesejahteraan batin (emosional dan spiritual). Inilah yang membedakan dengan organisasi publik lainnya. Oleh karena itu, tempat ibadah harus disadari dan dimaknai sebagai sebuah organisasi, karena setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan alat organisasional, seperti dalam hal pengelolaan keuangan adalah akuntansi.

Entitas sering kali diartikan sebagai satuan organisasi. Entitas dan akuntansi memiliki keterkaitan yang sangat erat karena dalam salah satu asumsi dasar akuntansi terdapat asumsi entitas akuntansi. Asumsi entitas akuntansi menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuntansikan adalah yang berkaitan dengan entitas (kesatuan atau organisasi) yang dilaporkan (Halim,2008). Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa agar akuntansi dapat berguna, maka tempat peribadatan harus dimaknai sebagai sebuah entitas atau sebuah organisasi. Bukan hanya sebagai sebuah bangunan tempat umat beragama melakukan ritual ibadah keagamaan.

Organisasi tempat ibadah juga disebut oleh Bastian (2007) dengan organisasi keagamaan. Secara etimologis, organisasi keagamaan dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu. Jika didasarkan pada definisi tersebut, organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat peribadatan seperti Masjid, Mushola, Gereja, Kapel, Kuil, Klenteng, Wihara, maupun Pura. Dengan kata lain, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tertentu (Bastian, 2007: 216).

Oleh karena melibatkan aspek keagamaan, ada pertanyaan apakah akuntansi sesuai dengan ajaran agama? Apakah agama mengaturnya? Jika memang diatur, bagaimana agama mengajarkannya? Tentu pertanyaan tersebut pantas dijawab terlebih dahulu. Karena salah satu penyebab kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntansi dalam pengelolaan keuangan tempat ibadah adalah adanya anggapan bahwa akuntansi produk ilmu pengetahuan manusia yang tidak ada dalam cakupan ajaran agama. Oke karena itu, peran penting akuntansi dapat terlihat jika tempat ibadah diposisikan sebagai entitas atau satuan organisasi.

Jika tempat ibadah merupakan sebuah organisasi, maka organisasi tempat ibadah termasuk dalam kategori organisasi apa? Pertanyaan ini perlu dijawab karena untuk menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan organisasi peribadatan. Oleh karena, organisasi peribadatan tidak bermotif untuk mencari laba dan bertujuan untuk melayani ritual ibadah umat, maka organisasi peribadatan termasuk dalam organisasi nirlaba. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah dana sumbangan yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang

dilayani, dan biaya overhead yang mampu diminimalisasikannya (Bastian, 2007). Pada organisasi masjid, tentu ukuran keberhasilan disesuaikan dengan beberapa aspek, seperti misalnya aspek kebersihan tidak hanya diukur dari kenyamanan maupun kepuasan umat muslim beribadah di masjid tersebut, tetapi juga kesesuaiannya dengan yang diajarkan oleh agama tentang tata cara bersuci (thaharoh) dan seluk-beluk kotoran atau najis. Untu itu, dalam organisasi keagamaan kesesuaian dengan ajaran agama juga memengaruhi ukuran keberhasilan dan standar pelayanan, yang nantinya juga memengaruhi kewajaran penggunaan dana yang dialokasikan.

A. Tujuan Organisasi Peribadatan

Setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik yang ingin dicapai. Karena organisasi peribadatan termasuk dalam organisasi nirlaba, maka tujuannya bukanlah untuk mencari laba sebagaimana organisasi privat atau swasta. Bastian (2007) menyatakan bahwa tujuan utama dari organisasi peribadatan atau keagamaan adalah untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Jadi, inti tujuan dari semua organisasi keagamaan adalah untuk melayani umat atau pengikut agamanya.

Pelayanan bagi umat ini dapat dimaknai secara sempit dan secara luas. Secara sempit, pelayanan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan kepada umatnya bertujuan agar proses peribadatan di dalam organisasi keagamaan tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin. Semua kebutuhan umat terkait dengan proses ritual peribadatan harus tersedia dan terjaga selama waktu yang tidak terbatas (Bastian, 2007) namun, dalam konteks pelayanan secara luas dapat dimaknai sebagai pelayanan kepada umat secara menyeluruh menyangkut berbagai aspek kehidupan

beragama dan bermasyarakat dari umat beragama tersebut. Hal ini tergantung dari bagaimana masyarakat setempat memosisikan peran dan fungsi tempat ibadah tersebut. Misalnya, apabila masjid difungsikan sebagai pusat aktivitas masyarakat sekitarnya, maka masjid tidak hanya dijadikan tempat untuk melakukan shalat dan berzikir saja, melainkan dapat difungsikan sebagai fasilitator untuk membahas permasalahan social kemasyarakatan seperti bagaimana mencari solusi untuk meningkatkan kualitas hidup umat muslim disekitar masjid tersebut berdiri. Peningkatan kualitas hidup ini dapat berupa peningkatan perekonomian masyarakat, misalnya dengan mendirikan Baitul Maal. Di bidang pendidikan, misalnya pengelola masjid dapat mengadakan penyelenggaraan pendidikan agama, untuk anak-anak maupun orang tua. Hal ini juga menunjukkan tujuan lain dari organisasi keagamaan, yaitu tujuan social kemasyarakatan dan pendidikan.

Meskipun tujuan utamanya adalah untuk pelayanan umat, bukan berarti organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan keuangan (Bastian, 2007). Tujuan keuangan ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai yang memenuhi standar sesuai aturan dalam ajaran agama tersebut (*shari'at*), serta menunjang tujuan lainnya seperti tujuan social kemasyarakatan dan pendidikan yang dicontohkan di atas. Tentunya, tujuan keuangan ini bukan untuk memperoleh keuntungan berupa *profit*, tetapi lebih kearah bagaimana membiayai kebutuhan beribadah umat dalam tempat ibadah dan fungsi social keagamaan lainnya. Untuk mencapai tujuan keuangan ini juga tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh ajaran agama, atau justru keberadaan tempat ibadah tersebut memberatkan masyarakat sekitarnya.

Seperti organisasi atau lembaga public lainnya, organisasi keagamaan juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomis

dan biaya social, serta dampak positif dan negatif dari aktifitas yang dilakukannya (Bastian, 2007). Semestinya, berbagai tuntutan tersebut dapat menyebabkan akuntansi diterima dengan cepat dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan publik, termasuk lembaga atau organisasi di lingkup organisasi keagamaan (Halim dan Kusyufi, 2014: 445). Namun, kenyataannya yang ada kebanyakan pengelola dan pengurus organisasi keagamaan belum menyadari menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*). Salah satu usaha untuk menciptakan tata kelola yang baik adalah dengan menciptakan akuntabilitas yang baik dengan menyelenggarakan praktik akuntansi. Akuntansi pada organisasi keagamaan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, dalam bentuk lengkap maupun acara sederhana sekalipun.

B. Fungsi dan Peran Organisasi Peribadatan

Tujuan utama tempat ibadah sebagai sebuah organisasi adalah untuk melayani keperluan umat dalam rangka melaksanakan ibadah ritual rutin maupun yang sifatnya incidental. Selain itu, juga ada tujuan-tujuan lain, seperti tujuan social kemasyarakatan. Begitu juga dengan masjid, tidak hanya berfungsi untuk tempat melakukan shalat berjamaah maupun shalat jumat saja, melainkan dapat berfungsi untuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat social kemasyarakatan. Seperti pada zaman Nabi Muhammad saw., masjid menjadi pusat segala kegiatan masyarakat (dikpoleksusbudhankam). Pada masa itu, masjid tidak hanya sebagai tempat peribadatan, pusat pendidikan, pusat budaya Islam, dan pertahanan dan keamanan kaum muslimin pada waktu itu. Pada saat Nabi Muhammmad saw, datang ke kota Madinah dalam rangka hijrah dari makkah, yang didirikan pertama kali

bukanlah benteng pertahanan, melainkan masjid (Ayub, 1996). Hal ini menunjukkan begitu pentingnya fungsi dan peranan masjid pada waktu itu.

Dalam konteks saat ini, masjid tidak mungkin lagi menjadi pusat kegiatan sebagaimana jaman Muhammad saw. Namun, Masjid sebagai pusat pendidikan, budaya Islam, pusat sosial kemasyarakatan maupun pusat ekonomi masih mungkin dijalankan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka organisasi peribadatan, dalam konteks ini dicontohkan organisasi masjid, dapat berfungsi sebagai:

1. Tempat beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
2. Tempat pembinaan kesadaran dalam beragama bagi umat agama tersebut
3. Tempat bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan umat muslim
4. Tempat berkumpulnya umat muslim (silaturahmi)
5. Tempat membina kerukunan dan gotong royong antar-umat muslim dengan memperkokoh ikatan batin dan rasa sepersaudaraan seiman sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama
6. Pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam bagi umat muslim di sekitarnya
7. Tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan mengelolanya
8. Tempat melaksanakan pengaturan dan pengawasan social

Sementara, berdasarkan tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi dari organisasi masjid, maka paling tidak masjid memiliki dua peranan besar, yaitu sebagai pusat ibadah dan pusat pembinaan umat (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya).

C. Manajemen Organisasi Peribadatan

Pengelolaan dan pengurusan atau manajemen tempat peribadatan biasanya berada pada satu tokoh agama yang disegani. Tokoh atau kelompok yang berpengaruh ini biasanya mengarahkan semua kebijakan dan pengelolaan organisasi. Tipologi pemimpin atau tokoh termasuk pilihan dan orientasi kebijakannya akan sangat berpengaruh dalam menentukan gaya manajerialnya, termasuk dalam menyusun struktur organisasi. Kondisi ini juga terjadi pada organisasi masjid. Bahkan, untuk masjid di desa-desa tokoh tersebut, biasanya seorang ulama, dapat saja menjalankan beberapa peran, seperti merangkap menjadi imam, khatib, panitia zakat, dan penyelenggara jenazah.

Biasanya struktur organisasi pada organisasi peribadatan, termasuk masjid, tidak terlalu formal dan sederhana. Biasanya pada organisasi masjid dikenal pengurusnya dengan sebutan ta'mir masjid yang terdiri dari pelindung, ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, seksi-seksi, dan pembantu umum. Pelindung biasanya dijabat oleh kepala desa atau dusun dan seorang tokoh agama, ketua dan wakilnya biasanya dari kalangan tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Sementara untuk posisi lain biasanya dari kalangan pemuda setempat. Selain kepengurusan masjid, juga ada satu atau lebih organisasi (bersifat semiotonom) diluar pengurus inti ta'mir masjid, namun masih memiliki hubungan koordinatif dengan atau berada di bawah ketua ta'mir. Badan organisasi tersebut biasanyadisebut dengan "Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)" atau "Remaja Masjid" yang memiliki struktur organisasi sendiri, namun masih menjadi bagian dari organisasi masjid secara keseluruhan.

Oleh karena itu, seringkali kemajuan sebuah masjid tergantung dari kapasitas sosioreligius dan organisasional tokoh agama yang menjadi panutan tersebut.

Semakin tinggi wawasan tokoh tersebut tentang manajemen dan sosioreliginya, maka semakin besar kesadaran akan pentingnya organisasi masjid dikelola dengan kaidah-kaidah organisasi modern, sehingga masjid dapat berperan dan berfungsi lebih besar untuk kemaslahatan umat. Namun, fakta yang adalah kesadaran dan kemampuan berorganisasi pengurus masjid relatif masih rendah, apalagi kesadaran untuk menerapkan akuntansi pada organisasi masjid. Pada sesi selanjutnya akan dibahas tentang peran strategis akuntansi dalam pengembangan manajemen masjid.

D. Manajemen Keuangan Organisasi Peribadatan

Pada umumnya manajemen keuangan didefinisikan sebagai pengorganisasi kekayaan yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut. Dengan kata lain, definisi yang lain mengatakan manajemen keuangan adalah kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana dengan tujuan meningkatkan atau memaksimalkan nilai organisasi. Dalam konteks organisasi peribadatan, manajemen keuangan organisasi peribadatan adalah usaha yang dilakukan pengelola tempat peribadatan dalam menggunakan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan kepentingan umat beragama, serta bagaimana memperoleh dana dari umat dari cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran agama.

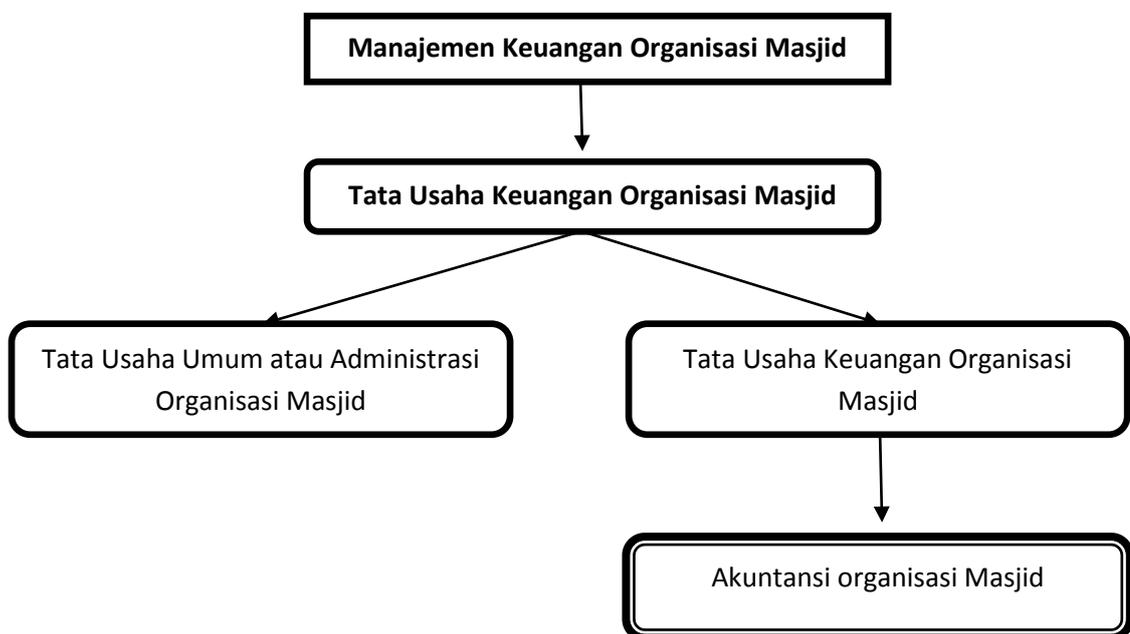
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam manajemen keuangan terdapat dua fungsi yaitu :

1. Fungsi mendapatkan dana; dan
2. Fungsi menggunakan dana.

Dalam fungsi pertama adalah bagaimana cara pengelola organisasi peribadatan dalam mendapatkan dana yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak memberatkan

umat. Sedangkan, fungsi kedua adalah bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Pada fungsi yang kedua, juga mencakup pertanggungjawaban pengelolaan dana. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ayub (1996) dalam konteks organisasi masjid, bahwa keuangan masjid meliputi cara mengumpulkan dana, sumber pendana, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana masjid.

Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan adalah tata usaha. Tata usaha dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tata usaha umum atau administrasi dan tata usaha keuangan. Akuntansi merupakan tata usaha keuangan. Jadi, akuntansi untuk organisasi keamanan merupakan tata usaha keuangan organisasi keagamaan. Hal ini sesuai dengan gambar berikut;



Gambar 1. Kedudukan Akuntansi dalam Manajemen Keuangan Organisasi Masjid.

Akuntansi masjid dapat diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan, berdasarkan prinsip,

standarnisasi, dan prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan dalam organisasi masjid. Akuntansi yang diterapkan pada organisasi keagamaan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik yang dimaksud adalah para anggota, umat, atau pengikut agama di organisasi keagamaan yang bersangkutan. Dalam hal ini domain publik dari organisasi masjid adalah umat muslim secara keseluruhan pada umumnya, dan masyarakat sekitar pada khususnya.

Dari segi sumber pendanaan atau lebih konkretnya struktur modal dan struktur pembiayaan, organisasi keagamaan sangat berbeda dalam hal bentuk dan jenisnya. Sumber pendanaan organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai umat untuk suatu agama. Karena sifatnya yang sukarela, karakteristik dana yang diperolehnya sulit untuk diprediksi perolehannya.

Pada organisasi masjid, umumnya sebagian besar sumber dana berasal dari umat muslim, walaupun tidak menutup kemungkinan bantuan dari pihak luar ataupun pinjaman. Namun, khusus untuk pinjaman biasanya dihindari oleh pengurus atau pengelola organisasi masjid, kecuali ada yang menjamin secara pribadi. Organisasi masjid memiliki sumber dana dari umat yang bisa dalam berbagai bentuk seperti infak, sedekah, zakat, fidyah, dan lain-lain sesuai ajaran Islam. Sedangkan, alokasi dana masjid selain untuk pemeliharaan bangunan beserta seluruh perlengkapannya secara berkala, juga dialokasikan untuk berbagai kegiatan lainnya seperti pengajian rutin atau yang bersifat incidental, TPQ atau pengajian anak-anak, bazaar, maupun kegiatan peringatan hari-hari besar Islam.

Adapun dalam konteks pola pertanggungjawabannya, jika organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik usaha atau krediturnya, maka pertanggung jawaban organisasi keagamaan dilakukan kepada seluruh umat yang telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Apabila elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat dipenuhi, maka implikasinya dapat berwujud ketidakpercayaan, ketidakpuasan, atau bahkan fitnah.

BAB III
ETNOSAINS SEBAGAI METODE ANALISIS DAN
CONTEXTUAL UNDERSTANDING

Prolog

Perkembangan akuntansi dalam konteks sosial dan praktik budaya yang kian beragam semakin mengukuhkan eksistensi paradigma kualitatif. Kemampuannya menghasilkan produk analisis yang mendalam selaras dengan *settingnya*. Beberapa metode penelitian berbasis kualitatif ini seperti; analisis wacana, studi kasus, semiotik dan etnografi kini mulai dilirik para ilmuwan dan peneliti akuntansi. Diskursus akuntansi bisa mengilustrasikan cara pandang monolitik yang dominan. Selain ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial, terutama sosiologi, terkesan masih relatif jarang dipakai sebagai alat analisis, khususnya dalam akuntansi. Jika mengikuti pendapat Covalski (1986), paling tidak sosiologi, psikologi dan antropologi adalah disiplin-disiplin lain yang sangat bermanfaat bagi kajian akuntansi. Hal ini mengarah pada suatu *multiparadigm science*. Implikasinya, akuntansi dapat dikaji dengan modus yang tidak lagi monolitik. Paradigma positif, interpretif, kritis, posmodernis atau mungkin spiritualis memiliki peluang yang sama pentingnya untuk digunakan. Hambatan tersulitnya, adalah keengganan dan ketakutan kita, para akademisi akuntansi sendiri, untuk melakukan suatu *scientific trajectory* yang lebih terbuka dan saling memahami, padahal ini lebih memberikan manfaat kepada lebih banyak pihak yang bekepentingan. Menyadari akan pentingnya manfaat multiparadigma dalam riset akuntansi maka peneliti mencoba menyelami metode pendekatan yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan antropologi yaitu; pendekatan etnosains dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran khusus instisari kebudayaan yang diteliti.

Etnosains, yang dalam bahasa asalnya disebut dengan “*Ethnoscience*”, atau dalam istilah lain disebut pula dengan “*The New Ethnography*”, atau “*Cognitive Anthropology*”

merupakan suatu metode etnografi dengan tipe yang khas, yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Dikatakan khas, karena sebelum munculnya etnosains sebagai suatu perkembangan dalam aliran baru antropologi, antropologi kognitif, telah dikenal beberapa metode etnografi yang dilakukan oleh antropolog. Pada bentuknya yang mula-mula, peneliti awal antropologi yang terkenal adalah W.H.R. Rivers dari Inggris dan Franz Boas dari Amerika. Pada tahap ini, metode wawancaranya secara khas disebut dengan istilah “*genealogical method*”. Teknik etnografinya yang utama adalah wawancara yang panjang, berkali-kali, dengan beberapa informan kunci. Tipe penelitiannya lebih bertujuan mendapatkan gambaran masa lalu suatu kelompok masyarakat (Spradley 2006:x). Berbeda dengan etnografi modern yang dipelopori oleh A.R.Radcliffe-Brown dan B. Malinowski, etnografi yang umum dijalankan pada masa kini, yang tidak terlalu memandang penting hal-hal yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Perhatian utamanya adalah pada kehidupan masa kini yang sedang dijalani oleh anggota masyarakat, tentang *way of life* masyarakat tersebut (Spradley 2006:x-xi).

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi adalah asumsi-asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat “pengetahuan” tentang dunia sosial. Pertanyaan dasar tentang metodologi menekankan kepada apakah dunia sosial itu keras, nyata, kenyataan objektif-berada di luar individu ataukah lebih lunak, kenyataan personal-berada di dalam individu. Selanjutnya para ilmuwan mencoba berkonsentrasi pada pencarian penjelasan dan pemahaman tentang apa yang unik/khusus dari seseorang dibandingkan dengan yang umum atau universal yaitu cara dimana seseorang menciptakan, memodifikasi, dan menginterpretasikan dunia dengan cara yang mereka temukan sendiri (Chairi, 2009).

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan

maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya?. Jadi riset kualitatif adalah berbasis pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal (Finlay, 2006). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*understandable*) dan kalau memungkinkan (sesuai modelnya) dapat menghasilkan hipotesis baru (Chariri, 2009).

Penelitian ini menerapkan rancangan etnosains, yang merupakan bagian dari etnografis, sedangkan etnografis sendiri adalah rancangan yang berasal dari bidang antropologi, khususnya dari kontribusi Bronislaw Malinowski, Robert Park, dan Franz Boas (Jacob, 1987; Kirk & Miller, 1986 dalam Creswell, J.W, 2009: 294). Tujuan penelitian etnografis adalah memperoleh “*gambaran umum*” mengenai subjek penelitian. Penelitian ini menekankan aspek pemotretan pengalaman individu sehari-hari dengan cara mengobservasi dan mewawancarai mereka dengan individu-individu lain yang relevan (Fraenkel & Wallen, 1990). Penelitian etnografis berusaha memperoleh gambaran menyeluruh untuk dapat menyingkap bagaimana manusia mendiskripsikan dan menstrukturkan dunia (Fraenkel & Wallen 1990).

1. EtnoSains

Etnosains adalah etnografi baru bagian ilmu antropologi atau “*The New Ethnography*”. Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan (Spradley, 1997: 3). Tujuan utama aktivitas ini adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Malinowski, tujuan etnografi adalah “memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya” (Malinowski, 1922 dalam Spradley, 1997). Oleh karena itu, penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan

bertindak dengan cara-cara yang berbeda (Spradley, 1997: 3). Inti dari etnografi adalah upaya memperhatikan makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami. Beberapa ini terekspresikan secara langsung dalam bahasa dan banyak diterima serta disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata dan perbuatan. Tetapi dalam setiap masyarakat, orang tetap menggunakan sistem makna yang kompleks untuk mengatur tingkah laku mereka, untuk memahami diri mereka sendiri dan untuk memahami orang lain, serta untuk memahami dunia dimana mereka hidup.

Kebudayaan didefinisikan dengan berbagai cara (Spradley, 1997:5). Marvin Harris mendefinisikan budaya sebagai “kebudayaan yang ditampakkan dalam berbagai tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti “adat” (*custom*), atau “cara hidup” masyarakat” (Spradley, 1997: 5). Walaupun untuk beberapa tujuan sangat membantu, definisi ini mengaburkan perbedaan penting antara sudut pandang orang luar dengan sudut pandang orang dalam. Pola tingkah laku, adat, dan pandangan hidup masyarakat, semua dapat didefinisikan, diinterpretasikan, dan dideskripsikan dari berbagai perspektif, karena tujuan kita dalam etnografi adalah “untuk memahami sudut pandang penduduk asli” (Spradley, 1997: 5).

3.2.Pengelolaan Peran Peneliti

Dalam proses pembentukan/konstruksi pengetahuan, peneliti merupakan figur utama yang mempengaruhi dan membentuk pengetahuan. Peran ini dilakukan melalui proses pengumpulan, pemilihan dan interpretasi data. Jadi, sangatlah tidak mungkin untuk melakukan penelitian, jika penelitian tidak terjun langsung pada obyek yang diteliti. Konsekuensinya, peneliti harus terlibat secara langsung dalam setiap tahap

kegiatan penelitian dan harus berada langsung dalam setting penelitian yang dipilih (Finlay, 2006).

Penelitian kualitatif merupakan proses yang melibatkan peserta (yang diteliti), peneliti dan pembaca serta *relationship* yang mereka bangun. Jadi, peneliti dipengaruhi oleh lingkungan sosial, historis dan kultural dimana riset dilakukan. Konsekuensinya, ketika melakukan penelitian, peneliti harus mampu membangun hubungan yang baik dengan obyek penelitian dan mampu menyajikan hasil penelitian sehingga pembaca dapat mengikuti dengan jelas alur pemikiran peneliti dalam membangun suatu pengetahuan.

Karena peran peneliti dianggap sebagai instrumen primer dalam pengumpulan data kualitatif maka dibagian awal penelitian diperlukan adanya identifikasi terhadap nilai-nilai, asumsi-asumsi dan bias-bias personal (peneliti). Kontribusi peneliti terhadap *setting* penelitian sangat penting dan positif, bukan malah merugikan (Locke et al., 1987 dalam Creswell J.W, 2009: 294).

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo, khususnya *stakeholders* yang secara langsung merasakan dampak dari permasalahan organisasi peribadatan yang memiliki hubungan erat disekitar masjid yang diteliti. Alasan memilih Kabupaten Gorontalo karena selain peneliti memiliki ikatan emosional (tempat tinggal) dengan Kabupaten Gorontalo. Disamping itu pula Gorontalo terdiri dari pola keragaman suku yang akan mewakili individu *stakeholders*. Maka, penelitian ini dipandang perlu melihat permasalahan tersebut dari perspektif spiritual dan nilai-nilai islam yang berasal dari kajian nilai-nilai lokal sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Kemudian dengan pihak *stakeholders* yang mewakili sebagai informan, untuk melihat seberapa jauh pemahaman mereka mengenai konstruk entitas peribadatan. Penggalan informasi ini diperlukan untuk membentuk pola Akuntansi Masjid yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Pihak *stakeholder*. Dan apabila pihak *stakeholders* belum sepenuhnya mengerti mengenai Akuntansi Masjid, maka diperlukan proses komunikasi lebih jauh diantara segi tiga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

3.4. Sumber Data

Sehubungan dengan jenis penelitian ini maka *key informan* yang dijadikan sumber utama yaitu informan yang terlibat secara langsung merasakan dampak dari pencemaran lingkungan. Berdasarkan pada metodologi etnografis, fokus penelitian adalah pengalaman dan peristiwa yang dialami informan, serta persepsi-persepsi dan makna-makna dalam pengalaman tersebut sesuai yang diungkapkan oleh informan sesuai dengan peristiwa-peristiwa atau informasi-informasi yang mengejutkan dan pemaknaan atas peristiwa-peristiwa atau isu-isu penting yang muncul (Creswell, J. W, 2009: 296). Penelitian dilakukan dengan mewawancarai tiga informan kunci yang mewakili perusahaan, pemerintah dan masyarakat (semua nama informan disamarkan).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah *apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana*. Penelitian

kualitatif bertumpu pada *triangulation data* yang dihasilkan dari tiga metode: interview, *participant observation*, dan telaah catatan organisasi (*document records*).

1. Pengamatan atau Observasi Lapangan (*Participant observation*).

Participant observation dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku individu dan interaksi mereka dalam *setting* penelitian. Oleh karena itu, Peneliti harus terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari subyek yang dipelajari. Dengan cara ini peneliti dapat memperoleh data khusus di luar struktur dan prosedur formal organisasi. Dalam *participant observation*, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melibatkan diri dalam aktivitas sehari-hari; Mencatat kejadian, perilaku dan setting sosial secara sistematis (apa yang terjadi, kapan, dimana, siapa, bagaimana). Adapun data yang dikumpulkan selama observasi adalah: deskripsi program, perilaku, perasaan, dan pengetahuan.
- b. wujud data adalah catatan (*field note*): Apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, siapa yang ada di sana.
- c. Catatan semua kejadian atau perilaku yang dianggap penting oleh peneliti (Bisa berupa *checklist* atau deskripsi rinci tentang peristiwa atau perilaku tertentu).

Dengan demikian, metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dalam bentuk eksplorasi dan inspeksi dalam bentuk mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung. Kondisi tersebut meliputi implementasi pertanggungjawaban sosial dalam konteks “amanah” serta kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

2. Wawancara Etnografis

Wawancara etnografis merupakan metode utama yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti beranggapan bahwa wawancara etnografis merupakan serangkaian percakapan persahabatan yang kedalamnya peneliti memasukkan beberapa unsur baru untuk membantu informan memberikan jawaban sebagai seorang informan. Pemakaian secara eksklusif beberapa unsur etnografis atau memasukkan unsur-unsur itu terlalu cepat akan membuat wawancara itu seperti interogasi formal (Spradley, J.P, 1997: 76).

Tiga unsur etnografis yang paling penting dalam wawancara etnografis menurut Spradley, (1997) adalah **pertama, tujuan yang eksplisit** yaitu ketika seorang etnografer bertemu dengan seorang informan untuk melakukan wawancara, maka keduanya menyadari bahwa pembicaraan itu selayaknya mempunyai arah. Informan mempunyai ide yang tidak jelas; dan peneliti (etnografer) harus menjelaskannya. Ini dimaksudkan, setiap kali peneliti menemui informan, maka perlu untuk mengingatkan informan kemana arah pembicaraan itu. Karena wawancara etnografis melibatkan tujuan dan arah, maka percakapannya cenderung lebih formal dibandingkan dengan percakapan persahabatan. Tanpa perlu menjadi otoriter, peneliti/etnografer secara perlahan mengontrol pembicaraan, dengan cara mengarahkan pembicaraan itu ke arah jalur-jalur yang menuju pada penemuan pengetahuan budaya informan. **Kedua, penjelasan etnografis** yaitu sejak pertemuan pertama sampai wawancara terakhir, etnografer secara berulang-ulang harus memberikan penjelasan kepada informan. Sambil mempelajari budaya informan, informan juga belajar tentang beberapa hal. dan **ketiga, pertanyaannya yang bersifat etnografis** yaitu pertanyaan yang memungkinkan seseorang untuk menguasai suatu bentuk pertanyaan etnografis dan menjadikannya bagian dari wawancara dengan berdasar pada tiga tipe utama

pertanyaan etnografis yaitu pertanyaan deskriptif, pertanyaan struktural dan pertanyaan kontras.

3. Telaah *Organisational Record*

Arsip dan catatan organisasi merupakan bukti unik dalam studi kasus, yang tidak ditemui dalam *interview* dan observasi. Sumber ini merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung data dari observasi dan *interview*. Selain itu, telaah terhadap catatan organisasi dapat memberikan data tentang konteks historis *setting* organisasi yang diteliti. Sumber datanya dapat berupa catatan administrasi, surat-menyurat, memo, agenda dan dokumen lain yang relevan.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data merupakan langkah terakhir penelitian sebelum melakukan penarikan suatu kesimpulan. Adapun analisis data terdiri dari;

Pertama, data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dengan jalan melakukan reduksi data, yaitu mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya. Reduksi data dilakukan dengan melakukan abstraksi data, yaitu membuat inti rangkuman. Kedua, data yang sudah dirangkum atau diorganisir ditentukan temanya. Tema merupakan keseluruhan informasi tentang

fenomena sosial. Tema dibentuk peneliti setelah mendalami data lapangan. Ketiga, mencari keterkaitan antar tema dan diberikan kode (*coding*) untuk melihat kesamaan pola temuan. Jadi, *coding* harus dilakukan sesuai dengan kerangka teoritis yang dikembangkan. Dengan cara ini, *coding* memungkinkan peneliti untuk mengaitkan data dengan masalah penelitian. Keempat, Interpretasi atas temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori yang relevan. Kelima, hasil interpretasi dituangkan dalam deskriptif analitik kontekstual. keenam, pengecekan validitas temuan. ketujuh, validasi data dilakukan triangulasi, meliputi triangulasi metode, teori, sumber data, informan dan data itu sendiri.

3.7. Pengecekan Validitas Temuan

Untuk melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh dilakukan melalui obyektivitas dan keabsahan data penelitian. Menurut Moleong (2010: 324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan yang didasarkan atas empat kriteria, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Pada dasarnya konsep validitas internal dari penelitian kualitatif tergantung oleh penerapan kriteria derajat kepercayaan dimana kriteria ini berfungsi sebagai: melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai dan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dapat diperlihatkan melalui kenyataan ganda yang sedang diteliti yang dapat dibuktikan oleh peneliti.

Pada penelitian kualitatif dikenal istilah kriteria keteralihan yang biasa disebut dalam penelitian kuantitatif sebagai validitas eksternal. Keteralihan merupakan persoalan empiris yang bergantung pada konteks pengirim dan penerima. Agar dapat

melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris mengenai kesamaan konteks.

Kriteria kebergantungan adalah substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Konsep kebergantungan cakupannya lebih luas dari reliabilitas. Ini disebabkan peninjauannya dari segi konsep memperhitungkan segalanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah dengan faktor-faktor lain yang memiliki keterkaitan. Kriteria kebergantungan ada dalam konteks pemeriksaan.

Kriteria kepastian asalnya dari konsep objektivitas dalam penelitian kuantitatif. Obyek pada penelitian kuantitatif lebih menekankan pada 'orang', maka dalam penelitian kualitatif obyek yang dimaksud adalah pada data. Sehingga isinya bukan berkaitan dengan cara ciri peneliti tetapi berkaitan dengan ciri-ciri data, apakah data itu dapat dipastikan.

BAB IV
TEMUAN SIMBOL-SIMBOL
SETTING SOSIAL PANDANGAN MASYARAKAT
PERLU TIDAKNYA LAPORAN SUMBANGAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN MASJID

Prolog

Konsep yang selama ini dikhiaskan sebagai “pengaruh” akuntansi adalah suguhan emansipatoris diskursif akuntansi yang mampu menjelajah semua tingkat sosial termasuk budaya sebagai cikal bakal filsafat pengetahuan akuntansi itu dibangun. Dalam praktek budaya, masyarakat gorontalo, khususnya yang berdomisili di kelurahan dutulanaa memandang kehadiran akuntansi secara administratif ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat memiliki kontribusi yang luar biasa. Mereka memandang bahwa sistim nilai dalam bentuk angka-angka keuangan tersebut dapat menjadi informasi yang berguna dalam kebijakan khususnya pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan organisasi. Dalam lingkup budaya Gorontalo, akuntansi menurut informan diterjemahkan sebagai alat “*deka-deka u porekenialo*” atau jika dialihkan bahasa ke Indonesia yang benar adalah “alat untuk menghitung”. Sebagai alat, akuntansi dikonstruksi melalui pemahaman budaya yang adaptif sebagai perangkat media untuk menganalisis, mengelompokkan dan penyajian informasi keuangan.

Pada bab ini peneliti berinisiasi mengangkat pemahaman masyarakat kabupaten gorontalo mengenai bagaimana makna akuntansi masjid, khususnya dari sudut pandang sumbangan dan pengelolaan keuangan menurut pemahaman penyumbang dan pengurus/pengelola masjid dari penduduk asli (masyarakat Gorontalo). Kemudian dari penelusuran dan pembahasan ini peneliti bermaksud menyibak pemahaman budaya yang terintegrasi dengan akuntansi agar tercipta akuntansi yang lebih altruistik dan bukan egoistik sehingga dari penelusuran ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memahami makna akuntabilitas dan transparansi, akuntansi masjid dan pengelolaannya, serta

perlu atau tidaknya melaporkan jumlah sumbangan untuk keperluan konstruksi akuntansi masjid dimasa yang akan datang.

4.1. Akuntansi Masjid Sebagai Pola Akuntabilitas yang Bersifat Vertikal dan Horizontal

Tempat ibadah sebenarnya tidak hanya bertujuan menjadi tempat ritual peribadatan umat beragama yang sifatnya rutin. Namun, apabila tempat ibadah dapat dikelola dengan konsep organisasi yang modern, maka dapat berkembang menjadi organisasi yang berperan dan berfungsi melebihi tujuan utamanya, yaitu melayani peribadatan.

Keberadaan masjid tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan dana yang berasal dari amal atau sumbangan umat yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Namun demikian, tidak berarti masyarakat tidak mementingkan pertanggungjawaban dari pengurus organisasi keagamaan, misalnya *ta'mir* masjid, terkait pengelolaan dana amal masjid. Untuk itu, akuntabilitas tetap penting dalam organisasi keagamaan.

Menanggapi konsep tersebut, secara realitas hal ini terlihat dari pemahaman pak Sunaryo Daud selaku informan kunci dalam penelitian ini. Perlu diketahui pak Sunaryo Daud adalah Ketua Ta'mirul Masjid Baitul Izza di Kelurahan Dutulanaa. Secara lugas beliau mengatakan:

“Peran serta masyarakat dalam sumbangan masjid seharusnya dijadikan barometer oleh pengurus dan pengelola organisasi peribadatan untuk mengelola keuangan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya sebagai bentuk penghargaan kepada para donator masjid. Dengan kata lain tanggungjawab dan transparansi menjadi tolok ukur rasa adil dan jujur dalam pengelolaannya”.

Argument beliau di atas sesungguhnya sedikit memberikan gambaran bahwasanya sistim nilai yang dianut oleh suatu lembaga atau organisasi yang mengelola keuangan perlu mengedepankan akuntabilitas dan transparansi baik dalam pengelolaan maupun laporan keuangannya. Hal ini menjadi penting mengingat sumbangan yang dikelola

dalam organisasi adalah penting untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya untuk tujuan kemaslahatan umat dan paling tidak untuk biaya operasional untuk tempat peribadatan.

Hal tersebut tentunya memiliki relevansi dengan simbol budaya yang dianut masyarakat Gorontalo, hubungannya dengan itu pak Arto Rahman selaku Imam Masjid mengemukakan pendapatnya:

“Adat Gorontalo sebenarnya mengajarkan kepada kita melalui simbol yang selama ini kita kenal dengan Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah adalah ontologi atau hakekat bahwa dalam kehidupan kita perlu mempertanggungjawabkan segala bentuk amanah yang diemban, baik pertanggungjawaban kepada manusia dan kepada Sang Khalik sebagai pemilik tunggal kehidupan”.

“... apalagi Gorontalo dijuluki Kota Serambi Medinah, paling tidak walaupun hanya sebuah julukan masyarakat perlu memahami bahwa budaya adaptif yang religius, yang dibangun dari pemahaman masyarakat secara bersama-sama perlu kita jadikan kompas untuk mengarahkan pola pikir masyarakat sesuai dengan kehendak Allah dan RasulNya, bukan hanya sebatas slogan tanpa makna. ...oleh karenanya, mungkin kita perlu menyadari bahwa ada Dzat Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kelak.”

Pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kepada Pembina. Dalam konteks yang lebih jauh lagi, pertanggungjawaban secara vertikal juga berarti pertanggungjawaban kepada Tuhan, meskipun tidak ada dalam bentuk materi maupun fisik. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan. Kedua pola pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik (Halim dan Kusufi, 2014: 454) .

Untuk memahami jauh kedalam konteks apa saja yang perlu diperthitungkan untuk menciptakan kondisi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, pak H. Ahmad Hasan memberikan sedikit masukannya:

“Bagi saya menghadirkan nuansa akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan paling tidak perlu dihidupkan dengan pola tata buku yang benar dalam penyusunan dan pelaporannya, kemudian dalam hal pengelolaan perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, tanggung jawab dan integritas, kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan pengawasannya”.

Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik diperlukan sarana untuk mewujudkannya, yaitu dengan menerapkan akuntansi pada organisasi keagamaan. Seberapa besar peran akuntansi dalam organisasi keagamaan diukur dari seberapa besar manfaat akuntansi pada organisasi keagamaan tersebut. Paling tidak ada tiga manfaat akuntansi menurut Halim dan Kusufi (2014: 455). , yaitu:

1. Penyediaan informasi yang akurat dan andal
2. Menciptakan akuntabilitas publik
3. Untuk pengendalian manajemen

Informasi yang akurat dan andal dapat berguna bagi pengurus organisasi keagamaan untuk pengambilan keputusan manajerial. Penerapan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dapat membantu pengurus untuk mengelola organisasi keagamaan dengan efektif dan efisien. Efektivitas pengelolaan dana terkait dengan kesesuaian alokasi dan penggunaan dana dengan tujuan organisasi, dan efisiensi terkait dengan kewajaran besaran dana yang digunakan untuk membiayai sebuah aktivitas atau kegiatan organisasi. Sedangkan untuk keperluan akuntabilitas publik, pengurus perlu menerapkan akuntansi keuangan. Tentunya, akuntansi keuangan yang sesuai dengan organisasi keagamaan adalah akuntansi untuk entitas nirlaba sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi untu Entitas Nirlaba. Berdasarkan PSAK No. 45, laporan keuangan yang harus disajikan adalah Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Halim dan Kusufi, 2014: 455).

Mungkin saat ini akuntansi belum dijadikan kebutuhan bagi sebagian besar pengurus organisasi masjid. Namun, tidak tertutup kemungkinan semakin meningkatnya

kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kesadaran umat muslim akan pentingnya gerakan kembali ke masjid, menjadikan penerapan system akuntansi yang baik menjadi kebutuhan mendasar bagi organisasi masjid.

4.2. Realitas Destruktif, Dilema si “Dia”: Antara sifat Ria, Takabbur dan Ikhlas

Dalam penerapannya akuntansi diplot agar mampu memberikan informasi yang akurat dan handal. Dengan fungsi diskursifnya akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan dalam menggali informasi keuangan dalam lingkup organisasi. Akuntansi bahkan ditengarai adalah “wajah dan hati” para pelaku keputusan sehingga akuntansi dapat eksis pada lingkungan dimana “dia” (akuntansi) di praktekkan. Walaupun, eksis yang dimaksud oleh peneliti ini adalah bersifat *negative action*. Karena bagi kami, akuntansi walaupun dipraktekkan dengan tidak benar “dia” tidak akan mati karena akuntansi bersifat konseptual dalam bentuk angka-angka keuangan saja. Melainkan para pelaku keuangan itulah dalam hal ini manusia akuntansinya (*accounting man*) yang akan mati karena manusialah yang menciptakan akuntansi dan lingkungannya, sebagai akibat dari proses berfikir dan bertindak ekonomi. Dalam *scope* organisasi peribadatan sifat-sifat *negative action* selalu muncul dan tidak dapat dihindari meskipun hadir dalam dinamika transaksional organisasi peribadatan. Sifat-sifat yang sering menghiasi pola pikir dan tindakan para penyumbang atau donator menuadalah sifat Ria dan Takabbur. Beberapa pemaknaan yang sering peneliti temukan menurut informan adalah sumbangan yang diberikan oleh donator kadang kala berdampak pada pencitraan para donator. Apakah citra itu baik atau buruk tergantung dari sisi mana “niat” dia menyumbang dan dari sisi bagaimana pula masyarakat menilainya. Misalnya menurut pendapat salah seorang jama’ah masjid (pak Metti) mengatakan:

“Jika para donatur menyumbang dengan nilai yang cukup besar katakanlah Rp. 100.000,- untuk urusan sumbangan kas masjid juma’atan yang biasanya hanya Rp. 2.000,- atau Rp 5.000,- yang disumbang, maka kemungkinan sifat ajib, ria dan takabbur yang hadir dihati si penyumbang”

Demikian halnya dengan apa yang diutarakan oleh pak Sunaryo Daud informan kunci kami, beliau menggaris bawahi permasalahan yang dihadapi sebuah masjid yang menjadi milik keluarga di sekitar kelurahannya;

“di daerah kami ada masjid yang menjadi milik keluarga, karena tanah masjid itu dihibahkan oleh salah seorang anggota keluarga, menurut sebahagian masyarakat bahwa dengan menghibahkan tanah untuk masjid maka orang yang menghibahkan tanahnya menjadi mudah untuk “katakanlah” *intercept* atau intervensi kedalam. masyarakat memandang bahwasanya sumbangan yang diberikan oleh jamaah mungkin tidak digunakan untuk kepentingan masjid melainkan untuk kepentingan pribadi (keluarga). Bagi saya ini menjadi celah terjadinya “fitnah” di kalangan pengurus dan jamaah, ...mungkin kalimat yang pantas dari sifat takabbur adalah “kalau bukan saya yang menghibahkan tanah ini mustahil masjid ini akan dibangun”, lanjutnya.”

Petikan pernyataan di atas pada hakekatnya adalah bentuk perhatian jamaah terhadap para donatur, bahwa dalam menyumbang para donatur perlu memandang dan mengedepankan rasa ikhlas sehingga sifat-sifat yang mengedepankan nafsu seperti ria dan takabbur bisa tereliminasi.

Untuk klarifikasi, tanggapan berbeda disampaikan oleh pak Ali (sebagai nama samaran), beliau adalah salah seorang jamaah yang menjadi penyumbang masjid:

“...saya menyumbang dengan jumlah sumbangan yang lebih besar bukan karena ingin pamer atau sekedar pencitraan, ...kalau saya mendapatkan rejeki lebih maka tidak ada salahnya saya menyumbang lebih dari biasanya”.

Agar lebih memperjelas maksud pak Ali tadi saya menanyakan perihal serupa kepada jamaah penyumbang lainnya yaitu pak Sutamin:

“... selama ini banyak informasi yang berkembang bahwasanya arus sumbangan masjid dan pengelolaannya sulit ditelusuri keberadaannya, kecuali entitas peribadatan yang betul-betul melaporkan laporan kas masjid atau keuangan masjid kepada jamaah. Ada beberapa masjid yang saya temukan melaporkan keuangan (kas masuk dan kas keluar) masjidnya di hari Jum’at dan ada juga yang tidak melaporkan.”

“...beberapa dari mereka beranggapan bahwa sumbangan itu tidak perlu dilaporkan karena bentuknya hanya pemberian sukarela dari jamaah atau masyarakat, demikian juga masjid tidak berorientasi pada keuntungan. ...mungkin perlu ada sosialisasi atau pelatihan untuk penerapan manajemen pengelolaan keuangan masjid jika itu dipandang penting untuk pengelolaan masjid, mengingat sumber daya manusia untuk pengelolaan keuangan untuk organisasi peribadatan masih sangat terbatas dan kurang memadai dari segi pengetahuan pembukuan (akuntansi)”.

Maksud dari petikan pemahaman informan di atas, sesungguhnya memberikan pengkhobaran kepada pemerhati studi ini bahwa dalam beramal para penyumbang perlu memperhatikan aspek “ikhlas” yang sebenarnya adalah realitas non-fisik yang berangkat dari niat yang suci karena Allah Ta’ala. Pemberian dalam bentuk sumbangan sebenarnya adalah sebuah “pengharapan yang tinggi” bahwa apa yang kita perjuangkan di jalan Allah bukan untuk mendapatkan balasan dari manusia, melainkan untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang Tuhan. Balasan yang peneliti maksudkan bukan bersifat materi melainkan sifatnya adalah Qudrat Allah yang meliputi bumi dan langit untuk keselamatan di dunia dan akherat. Sesungguhnya orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah SWT surat At-Taubah [9]: 20 yang alih bahasa indonesianya:

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”.

Pada kesempatan yang berbeda, tepatnya hari Jum’at ketika peneliti mendatangi masjid Baitul Izza di Kelurahan Dutulanaa, bermaksud untuk menunaikan sholat Jum’at di masjid itu, peneliti menyempatkan diri berdiskusi atau menyapa sekedar menggali informasi salah seorang anggota pengurus Ta’mirul Masjid yaitu Pak Ustadz Warno yang kebetulan pada kesempatan itu beliau akan bertugas sebagai khotbah Jum’at, beliau memberikan penyegaran dengan menyinggung atau menggaris bawahi bahwa:

“Allah dan RasulNya melarang kita untuk melakukan perbuatan tercela, dan bahwa segala sesuatu harus berangkat dari niat yang suci, artinya ketika memberikan sumbangan atau apapun itu untuk kepentingan masjid kita harus

mengedepankan rasa ikhlas karena Allah ta'ala. ...sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan bentuk amalan kita melainkan niat didalam hati itulah yang di tilik oleh Tuhan”, lanjutnya”.

Konteks di atas sebenarnya memberikan suguhan eksistensi manusia sebagai *Mukmin* dimana manusia menjadi satu-satunya pengelola isi bumi yang di amanahkan (*Khalifah*) oleh Allah SWT dibanding makhluk lainnya. Sebagai pengelola manusia hendaknya bersifat “*sami'na wa 'ata'na*” yang artinya “kami dengar dan kami taati”. Dan tidak membangkang apa yang di amanahkan Tuhan. Salah satu nilai Tauhid yang perlu kita emban adalah rasa “ikhlas” sebagai kendaraan yang memimpin *mukmin* manusia dalam beramal dan beribadah.

4.3. Realitas Konstruktif: Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Aksentuasi Budaya

Beberapa pemikir bahkan pernah mengkaji nilai budaya dan akuntansi kedalam konteks Tauhid. Pelaporan yang hanya menyajikan *private costs and benefits* jelas mengakibatkan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi bias, menjadi terlalu egoistik. Oleh karena itu, ketimpangan yang ada di akuntansi modern perlu diperbaiki dengan cara memadukan dengan sifat lain, sebagaimana kita pahami dari nilai filsafat *manunggaling kawulo gusti* (Triyuwono, 2006: 370).

Manunggaling kawulo-Gusti, menurut Endaswara (2003; 37), merupakan refleksi sikap *manembah* orang jawa, yaitu “menghubungkan diri secara sadar, dekat, menyatu dan manunggal dengan Tuhan”. Sikap lain orang Jawa yang memiliki nilai manunggal adalah *memayung hayuning bawana*. Sikap ini pada dasarnya adalah sikap yang tidak mementingkan diri sendiri untuk kebahagiaan hidup, sebagaimana dikatakan oleh Endraswara (2003; 38):

“*Mamayung hayuning bawana* adalah watak dan perbuatan yang senantiasa memwujudkan dunia selamat, sejahtera dan bahagia. Manusia seharusnya bekerja tidak didorong oleh kepentingan diri, melainkan untuk kepentingan bersama.

Manusia seharusnya berbuat untuk kepentingan bersama dan orang banyak, bukan kepentingan individu...

Paling tidak konsep yang disuguhkan melalui penggalian budaya adat Jawa dalam penafsiran akuntansi di atas pada hakekatnya adalah simbol Tauhid dalam adat istiadat Jawa. Konteks tersebut adalah pemaknaan bahwasanya dalam berinteraksi antara sesama kita perlu memproteksi diri dari sifat-sifat dorongan hawa nafsu atau dengan kata lain sifat altruisme atau lebih mengutamakan (secara situasional) menempatkan kepentingan golongan dari pada kepentingan individu (egoistik) menjadi perhatian kita bersama-sama. Karena akuntansi yang egoistik akan menghantarkan terciptanya realitas yang juga egoistik, yang pada gilirannya akan tercipta realitas destruktif baik pada lingkungan fisik maupun psikis, dan spritual manusia (Triyuwono, 2006; 371).

Realitas yang materialistik bukan sebatas ilusi, tapi fakta empiris yang dapat kita temukan sehari-hari (Triyuwono, 2006; 376). Yaitu, kehidupan manusia modern. Manusia modern berorientasi pada dunia materi, dan sebaliknya, mengabaikan dunia non-materi. Dari beberapa konsep yang di sampaikan oleh Triyuwono (2006); Burrell dan Morgan (1979); Nasr (1993) sesungguhnya menggambarkan bahwa realitas tertinggi adalah spritual.

“The intellectual origin of the radical humanist paradigm can be traced back to the tenets of German Idealism and the Kantian notion that the ultimate reality of the universe is spritual rather than material in nature” (Burrell and Morgan, 1979; 279).

Pendapat tersebut tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan Nasr:

...bahwa ada tingkatan-tingkatan realitas dan bahwa realitas tidak saja secara empiris dapat didefinisikan sebagai kontinum psiko-fisik “di luar sana.” Dunia adalah nyata sepanjang ia dapat mengungkap bahwa Tuhan yang tunggal adalah nyata. Tetapi dunia juga tidak nyata sepanjang ia menyembunyikan dan menyelimuti Tuhan sebagai realitas (1993, 11).

Bagi peneliti sendiri, menanggapi apa yang diutarakan beberapa ahli di atas memberikan penafsiran bahwa realitas yang dipertontonkan selama ini adalah bentuk

yang utuh dari materialistik dan bukan bentuk yang utuh dari akuntansi. Ada sketsa tingkatan manusia yang memandang bahwa “kebenaran hanya bisa dipandang dengan realitas fisik semata” (konsep filsafat materialisme) artinya dalam kehidupan sehari-hari mereka mengutamakan kepentingan duniawi dan merasa aman berada di wilayah itu (*comfort zone*). Pada akhirnya, seluruh cara pandang dan pola pikir mereka senantiasa menuntun kepada jaring-jaring perbuatan tercela. Oleh karena itu, memahami jauh kedalam konteks, seorang pemikir perlu mendalami dan memahami dari mana kebijakan akuntansi itu dikonstruksi.

Akuntansi sendiri tidak bisa lepas dari peranan budaya, bahwa akuntansi lahir dari budaya dan akuntansi adalah hasil cipta budaya. Selaras dengan pandangan ini Tricker (1978; 8) melihat akuntansi sebagai anak dari budaya dimana akuntansi itu berada. Dengan kata lain, akuntansi dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi social yang sangat kompleks (*complicated social interaction*) (lihat misalnya Morgan 1988, Hines 1989, dan Francis 1993). Pemahaman-pemahaman masyarakat kuno hingga masyarakat moderen memiliki konteks pemaknaan yang berbeda-beda mengenai penafsiran akuntansi. Bahkan perkembangan saat ini akuntansi dipandang sebagai ilmu berparadigma ganda. Oleh karena itu, para pengelola (manusia akuntansi) perlu menyesuaikan dengan lingkungan dimana akuntansi dipraktekkan, salah satunya adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporannya. Karena praktek akuntansi yang tidak akuntabel dan transparan melalui penyajian informasi laporan keuangan akan berdampak negatif bagi organisasi itu sendiri. Sehingga yang akan diperhadapkan kepada para pemangku kepentingan adalah informasi-informasi yang bias dan tidak pasti yang tentunya hanya akan merugikan semua pihak.

Menanggapi ketidakpastian (*uncertainty*) mengenai perlu atau tidak menyampaikan laporan sumbangan donatur pak Sunaryo mengutarakan:

“...dalam beberapa kesempatan laporan sumbangan dan posisi keuangan masjid pernah di laporkan. ...sebaiknya laporan keuangan masjid harus disampaikan setiap minggunya, agar jamaah (masyarakat) merasa percaya dengan sumbangan yang mereka donasikan, walaupun sebenarnya sebahagian dari mereka tidak mengharuskan pengurus atau pengelola menyampaikan informasi keuangan masjid. Bagi saya, sekali lagi, ini adalah bentuk penghargaan kepada para penyumbang bahwa uang yang mereka sumbangkan untuk keperluan peribadatan dan sosial dikelola dengan pembukuan dan dengan prinsip-prinsip pencatatan yang baik.”

Gambaran di atas adalah situasional realitas yang lahir dari *habit* (kebiasaan) dan berlangsung secara terus menerus sehingga melahirkan budaya kurang baik. Pada keadaan menggambarkan bagaimana lingkungan mempengaruhi akuntansi dimana dia dipraktekkan. Ada ketidakpastian, jarak kekuasaan yang menjadi permasalahan ditengah jamaah (masyarakat) masjid. Kemudian membentuk perbedaan pemahaman antara kelompok yang satu dengan lainnya. Memahami konteks budaya seorang antropolog seperti Hofstede (1980; 1983) mengutarakan:

Dia mendefinisikan budaya sebagai “*The collective programming of the mind which distinguishes the members of one human group from another*” (Hofstede 1983) dan membagi dimensi budaya menjadi 4 bagian :

- a. *Individualisme vs kolektivisme* merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung.
- b. *Large vs Small Power Distance (Jarak kekuasaan)* adalah sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima. Pada masyarakat yang *power distance* besar, adanya pengakuan tingkatan didalam masyarakat dan tidak memerlukan persamaan tingkatan. Sedangkan pada masyarakat yang *power distance* kecil, tidak mengakui

adanya perbedaan dan membutuhkan persamaan tingkatan didalam masyarakat.

- c. *Strong vs Weak Uncertainty Avoidance* (Penghindaran ketidakpastian) adalah sejauh mana masyarakat merasa tidak nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Masyarakat dengan tingkat menghindari ketidak pastian yang rendah akan lebih santai sehingga praktik lebih tergantung prinsip dan penyimpangan akan lebih bisa ditoleransi.
- d. *Maskulinitas vs femininitas* adalah sejauh mana peranan gender dibedakan dan kinerja serta pencapaian yang dapat dilihat lebih ditekankan daripada hubungan dan perhatian. Nilai maskuline menekankan pada nilai kinerja dan pencapaian yang nampak, sedangkan feminim lebih pada preferensi pada kualitas hidup, hubungan persaudaraan, modis dan peduli pada yang lemah.

Jika dilihat dari konteks yang dimaksudkan oleh para pemikir akuntansi dan budaya di atas tidak selamanya lingkungan mempengaruhi akuntansi di mana dia dipraktekkan. Meskipun akuntansi dibentuk oleh lingkungan, ia dapat pula berbalik mempengaruhi lingkungannya sebagaimana telah diungkapkan oleh Sombart (1924) dalam Triyuwono (2006). Substansi dua pandangan tersebut (Tricker, 1978 dan Sombart, 1924) di atas dipertegas oleh Mathews dan perera (1993; 15) dengan mengatakan:

Although the conventional view is that accounting is socially constructed as a result of social, economic and political events, there are alternative approaches which suggest that accounting may be socially constructing.

Hakikatnya menurut Triyuwono (2006: 101) adalah akuntansi laksana pedang bermata dua. Ia dibentuk oleh lingkungannya (*socially constructed*) dan sekaligus membentuk lingkungannya (*socially constructing*). Ini akhirnya dapat dijadikan sebuah kepastian bahwa akuntansi bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktik yang

bebas dari nilai (*value-free*), tetapi sebaliknya ia adalah disiplin dan praktik yang sarat dengan nilai.

Klaim terhadap eksistensi nilai universal boleh dikata merupakan sebuah cirri yang dimiliki oleh akuntansi modern atau modernitas. Klaim ini adalah salah satu bentuk “logosentrisme”, yaitu sistem pola berpikir yang mengklaim adanya legitimasi dengan referensi kebenaran universal dan eksternal (Rosenau, 1992; xii).

BAB V

KILAS BALIK: MASALAH DAN SOLUSI PEMECAHANNYA

Prolog

Studi ini adalah riset awal untuk menyelidiki (*inquiry*) pola pemahaman masyarakat mengenai perlu atau tidaknya melaporkan posisi keuangan kepada jamaah mengingat berkembang *mind set* ditengah masyarakat bahwa dengan melaporkan jumlah sumbangan maka akan berdampak pada bentuk pencitraan si “penyumbang” karena terkadang sifat ria dan takabbur sering menyelimuti hati manusia ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak biasanya dilakukan oleh orang lain atau melebihi orang lain, agar dipandang dermawan atau baik hati. Realitas semacam ini sering kita jumpai dalam lingkup organisasi termasuk organisasi peribadatan. Bahkan ada juga realitas sebahagian penyumbang tidak mencantumkan namanya, hanya nama samaran saja yang ditulis seperti; hamba Allah dan lain-lain sebagainya, seolah-olah ingin mempertegas dan mengisaratkan bahwa itu adalah bentuk ikhlas, yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, hanya dirinya dan Allah yang tahu amalannya itu. Perasaan dilema atau ragu-ragu untuk memilih apakah perlu melaporkan sumbangan menyebabkan peran organisasi masjid dalam memberikan informasi posisi keuangan kepada *stakeholder* menjadi kurang efisien.

Bab ini akan menjelaskan secara eksplisit apa yang melatar belakangi masyarakat tidak memandang penting pelaporan posisi keuangan masjid dan diharapkan melalui penelusuran budaya dan agama penelitian ini akan mampu memberikan solusi jalan keluar permasalahan yang dihadapi masyarakat.

5.1. Minimnya Pemahaman Masyarakat Pentingnya Pelaporan Keuangan

Bagi sebahagian pemangku kepentingan (*Stakeholder*) beranggapan bahwa informasi angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan adalah alat untuk

memediasi kepentingan para *stakeholder*. Artinya, dengan adanya informasi yang disajikan tersebut akan lebih mempermudah seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi dan untuk mengetahui informasi mengenai posisi keuangan periode tertentu. Untuk organisasi peribadatan sendiri bentuk pelaporan akuntansi di atur dalam PSAK 45 yaitu mengatur bentuk penyajian laporan keuangan untuk organisasi nirlaba.

Terjadinya permasalahan dilingkungan entitas peribadatan disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya laporan keuangan. Mungkin perlu ada penyegaran, atau paling tidak sosialisasi dari seseorang (yang lebih memahami) diantara jamaah mengenai pentingnya tata buku dan pelaporan tersebut. Dengan pemahaman atau minimal sekedar memberikan pengetahuan ketika diadakannya kegiatan Majelis Taklim, Majelis Dzikir dan kegiatan lainnya, diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat yang menganggap “tabu” dengan penyampaian informasi posisi keuangan.

5.2. Masih Terbatasnya Perhatian Pemerintah terhadap Organisasi Masjid

Kalau kita melihat potret lingkungan masjid, kita akan menemukan masih banyak masjid yang bertahun-tahun selesai dibangun. Kita dapat mengamati masih banyak masjid yang berdiri sebatas pondasi atau belum memiliki atap. Padahal masjid adalah pusat kajian dan dakwah serta peribadatan. Sebagai organisasi yang bernaung dibawah pemerintah, selayaknya masjid mendapat perhatian lebih untuk meningkatkan taraf hidup dan pembinaan mental dan spiritual.

Dalam realitasnya, organisasi masjid atau entitas peribadatan masih terbilang baru dan kurang mendapat perhatian. Mungkin ada baiknya pemerintah memberikan bantuan kepada masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang mengelola entitas peribadatan guna

menutup biaya operasional seperti; biaya listrik, biaya air, biaya kebersihan dan lain sebagainya. Tujuannya, agar pengelola atau pengurus masjid tidak selalu berharap kepada para donatur dan agar pengelolaannya lebih mandiri.

5.3. Sumber Daya Manusia yang belum Mumpuni dalam Mengelola Keuangan

Sumber daya manusia menjadi penting untuk pengelolaan keuangan, paling tidak pengurus mesjid memberikan kursus kilat kepada bendaharawan masjid dengan mengundang para pendidik yang kompeten/ahli untuk belajar atau sekedar memberikan kursus misalnya; cara penyusunan laporan keuangan nirlaba, pemahaman mengenai bagaimana mengelola keuangan, mengaudit dan lain sebagainya. Dengan adanya pelatihan-pelatihan semacam itu, maka, diharapkan akan menambah pengetahuan bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar.

5.4. Perlunya Kajian-kajian Islami Secara Menyeluruh

Untuk mengantisipasi sifat-sifat yang muncul seperti; ria dan takabbur. Perlunya penyegaran kembali kepada masyarakat bahwa sifat-sifat semacam itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Karena amalan apapun yang dilakukan oleh manusia kalau tidak terbit dari hati yang takwa, hanya untuk pamer atau diperhatikan orang lain akan sia-sia dihadapan Tuhan. Untuk itu perlunya pembinaan menyeluruh dalam bentuk wiridan pengajian serta perlunya juga memberikan informasi tambahan pentingnya melaporkan posisi keuangan masjid, dalam bentuk akuntabilitas dan transparan sehingga diharapkan dari kegiatan tersebut akan terbina rasa tanggungjawab dan integritas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan masjid.

Secara singkat penelitian ini berhasil mengangkat apa yang menjadi permasalahan dalam organisasi peribadatan mengenai dilema akuntabilitas dan transparansi dalam

pelaporan sumbangan dan pengelolaan keuangan masjid. Melalui informasi yang terkandung dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan akuntansi dimasa yang akan datang.

Dengan beberapa solusi yang peneliti tawarkan di atas, diharapkan dapat dijadikan bahan renungan sebagian bagaimana seseorang melihat, merespon dan mengembangkan realitas kehidupan-khususnya realitas bisnis dan akuntansi

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Studi ini menemukan permasalahan yang muncul antara pilihan perlu atau tidaknya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan posisi keuangan. Melalui simbol-simbol yang dipertukarkan oleh masyarakat terdapat temuan bahwa masyarakat masih merasa “tabu” dengan adanya pelaporan keuangan pada organisasi peribadatan sebagai akibat dari adanya sebahagian masyarakat yang memandang bahwa melaporkan jumlah sumbangan si “penyumbang” adalah keliru dan hanya akan mengakibatkan penyumbang pamer (ria) dan takabbur dan sebagainya.

Untuk menghindari terjadi “dilema” melalui studi ini kemudian peneliti memberikan solusi pemecahannya dengan berdasar kepada 4 hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi dalam mengelola organisasi dan keuangan masjid, sebagai sebab terjadinya masalah di masyarakat, yaitu; 1. Minimnya pemahaman masyarakat pentingnya pelaporan keuangan, 2. Masih terbatasnya perhatian pemerintah terhadap organisasi masjid, 3. Sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam mengelola keuangan, dan 4. Perlunya kajian-kajian islami secara menyeluruh.

6.2. Saran

Mengingat penelitian ini adalah riset awal, maka untuk lebih jauh lagi bisa dikembangkan misalnya dengan menggunakan studi “*dramaturghy*” metodologi untuk memahami “*front stage*” dan “*back stage*” untuk memahami apa yang melatarbelakangi perumus dan lembaga-lembaga terkait lainnya atas keputusan dan kebijakan yang diambil. Pada akhirnya, penelitian ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran pembaca sangat diperlukan untuk pengembangan dan perbaikan riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, W dan Iwan, M.P. 2009. *Perspektif Budaya; Kumpulan tulisan Koentjaraningrat Memorial Lectures I-V/2004-2008*. Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga
- Benedict, Ruth, *Patterns of Culture*. Boston: Houghton Mifflin Co., 1980.
- Bungin, Burhan.2008. *Penelitian Kualitatif, Kencana*, Jakarta.
- Burrell, G., dan G. Morgan, 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*, Heinemann, London.
- Chariri, A. 2009. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif". *Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Creswell, J. W. 2009. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Mistik Kejawaen: Sinkritisme, Symbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi
- Efferin, et. al. 2004. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Francis, Jere R. 1990. After Virtue? Accounting as a moral and discursive practice. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 3 (3): 5-17.
- Giddens, Anthony. 2007. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Habermas, J. 1971. *Knowledge and Human Interest*. Boston Mass, Beacon Press.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik; Teori, Konsep dan Aplikasinya*. Salemba Empat. Jakarta
- Harris, Marvin, "*Culture, People, Nature; An Introduction to General Anthropology*", New York, Harper and Row Publishers, 1988.
- Hofstede, G. 1980. *Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values*, CA: Sage Publication, Beverly Hills.
- Hofstede, G. 1983. National Culture in Four Dimensions: A Research Based Theory of Cultural Differences among Nations. *International Studies of Management & Organization. Vol XIII, No.1- 2: 46 - 74*

- Hofstede, G. 1991. *Cultures and Organizations: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival* London: Harper Collins Publishers
- Irvine, Helen. (2004). "Balancing Money and Mission in A Local Church Budget". School of Accounting and Finance, University of Wollongong. Australia. Research Article.
- Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern; Teori, Fakta dan Aksi Sosial*, Kencana, Jakarta.
- Jacob, Kerry. (2004). "The Sacred and The Secular: Examining The Role of Accounting in The Religious Context". Departemen of Accounting and Management, School of Business. La Trobe University, Melbourne, Australia.". Research. Article.
- Jacob, Kerry and Walker, Stephen. (2004). "Accounting and Accountability in the Iona Community". Departemen of Accounting and Management, School of Business. La Trobe University, Melbourne, Australia And Cardiff Business School, UK". Research Article.
- Laughlin, R. (1988), "Accounting in its social context: an analysis of the accounting systems of the Church of England", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 1 No. 2, pp. 19-42.
- Laughlin, R. (1990), "A model of financial accountability and the Church of England", *Financial Accountability & Management*, Vol. 6 No. 2, pp. 95- 114.
- Laughlin, R. (1995), "Empirical research in accounting: alternative approaches and a case for middle range thinking", *AAAJ*, Vol. 8 No. 1, p. 63.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marzali, Amri. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mathews, MR and MHB Perera. 1993. *Accounting Theory and Development*. Melbourne: Thomas Nelson Australia
- Mcphail, Ken. (2008). "Accounting and Theology an Introduction: Initiating A Dialogue Between Immediacy and Eternity". University of Glasgow. UK. Research Article.
- Morgan, Gareth. 1998. Accounting as reality construction: towards a new epistemology for accounting practice. *Accounting, Organizations and Society* 13 (5): 477-85
- Nasr, Seyyed Hossein. 1993. *The Need for a Sacred Science*. Richmond: Curzon Press.
- Parsons, T. 1990. Prolegomena to a Theory of Social Institutions, *American Sociological Review*.

- Posey, Darrell Addison. 1999. *Cultural and Spritual Values of Biodiversity: A Complementary Contribution to the Global Biodiversity Assessment*, Intermediate Technology Publications and UNEP, London.
- Richardson, Miles, "Anthropologist-the Myth Teller," *American Ethnologist*, 2, no.3 (August 1975).
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*, Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Edisi 1, PT. Raja rafindo Persada, Jakarta.
- Roseneau, Pauline M. 1992. *Post-modernisme and the Social Science: Insights, Inroads, and Intrusions*. New Jersey: Princeton University Press.
- Siegel, G. dan Helena M. Marconi. 1989. *Behavioral Accounting*, South Western Publishing Co., Ohio.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi/James P. Spradley*; penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth; Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Spradley, J.P. 2007. Edisi Kedua. *Metode Etnografi*. (diterjemahan oleh Misbah Zulfa Elizabeth). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tricker, RI. 1978. *Research in Accounting*. Arthur Young Lecture No. 1. University of Glasgow Press
- Tinker, Toni.. (2004). "The Enlightenment and Its Discontents: Antinomies of Christianity, Islam and The Calculative Sciences". Departemen of Accounting, University of New York. USA. Research Article.
- Triuwono, Iwan. (2000). "Organisasi dan Akuntansi Syariah". LKiS. Yogyakarta.
- Triuwono, Iwan. (2006). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Raja Grafindo. Jakarta
- Warsono, Soni. (2010). " Reformasi Akuntansi: Membongkar Bounded Rationality".Asgard Chapter. Yogyakarta.

<http://www.gorontalo.go.id/home/show/16>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Gorontalo